

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**REORIENTASI PERAN PENDIDIKAN NASIONAL
MEWUJUDKAN GENERASI EMAS**

Oleh :

BASTONI PURNAMA, S.I.K
KOMBES POL NRP 73120837

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul:

“REORIENTASI PERAN PENDIDIKAN NASIONAL MEWUJUDKAN GENERASI EMAS”

Penentuan tutor dan judul Taskap ini didasari oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tertanggal 29 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXII tahun 2021 untuk menulis Taskap dengan judul yang ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Bapak Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pembimbing atau Tutor Taskap saya yaitu **Mayjen TNI Gunung Iskandar** dan **Tim Penguji Taskap** serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna menyempurnakan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai dan kita banggakan.

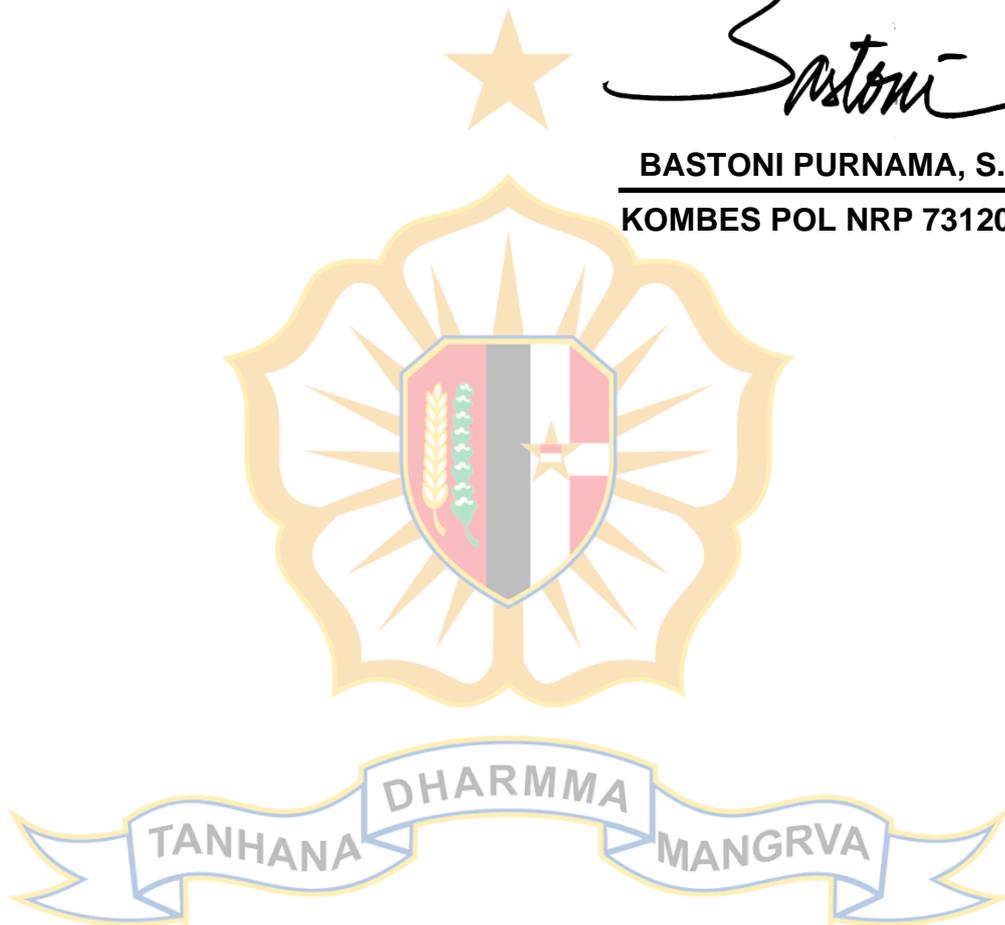
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Juli 2021

Penulis Taskap



BASTONI PURNAMA, S.I.K
KOMBES POL NRP 73120837



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bastoni Purnama, S.I.K
Pangkat / NRP : Komisariss Besar Polisi / 73120837
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bidang Faskom Slog Polri
Instansi : POLRI
Alamat : Jl. Raya Bekasi Timur Raya No. 86 Kel. Cipinang,
Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur 13240

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiat, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Penulis Taskap

A handwritten signature in blue ink over a 20,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'TGL. 20 METEOR TEMPERI', and the serial number '821C4AJX191572411'.

BASTONI PURNAMA, S.I.K
KOMBES POL NRP 73120837

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

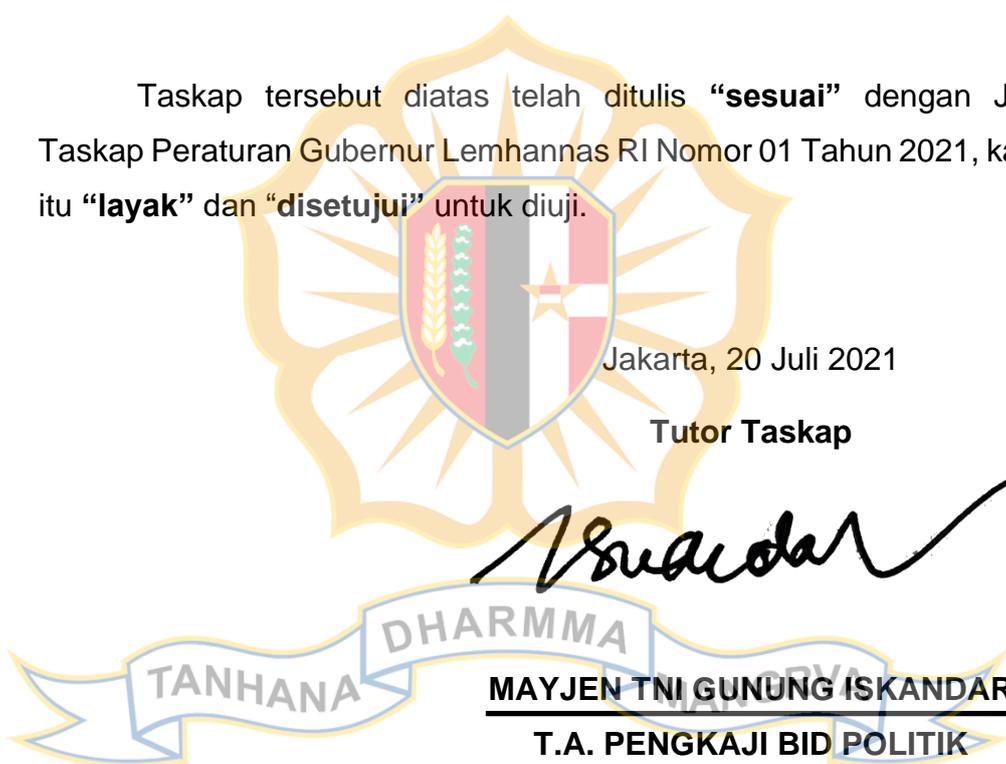
Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Kombes Pol. Bastoni Purnama, S.I.K.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
LXII Tahun 2021
Judul : **REORIENTASI PERAN PENDIDIKAN NASIONAL
MEWUJUDKAN GENERASI EMAS**

Taskap tersebut diatas telah ditulis "**sesuai**" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2021, karena itu "**layak**" dan "**disetujui**" untuk diuji.

Jakarta, 20 Juli 2021

Tutor Taskap

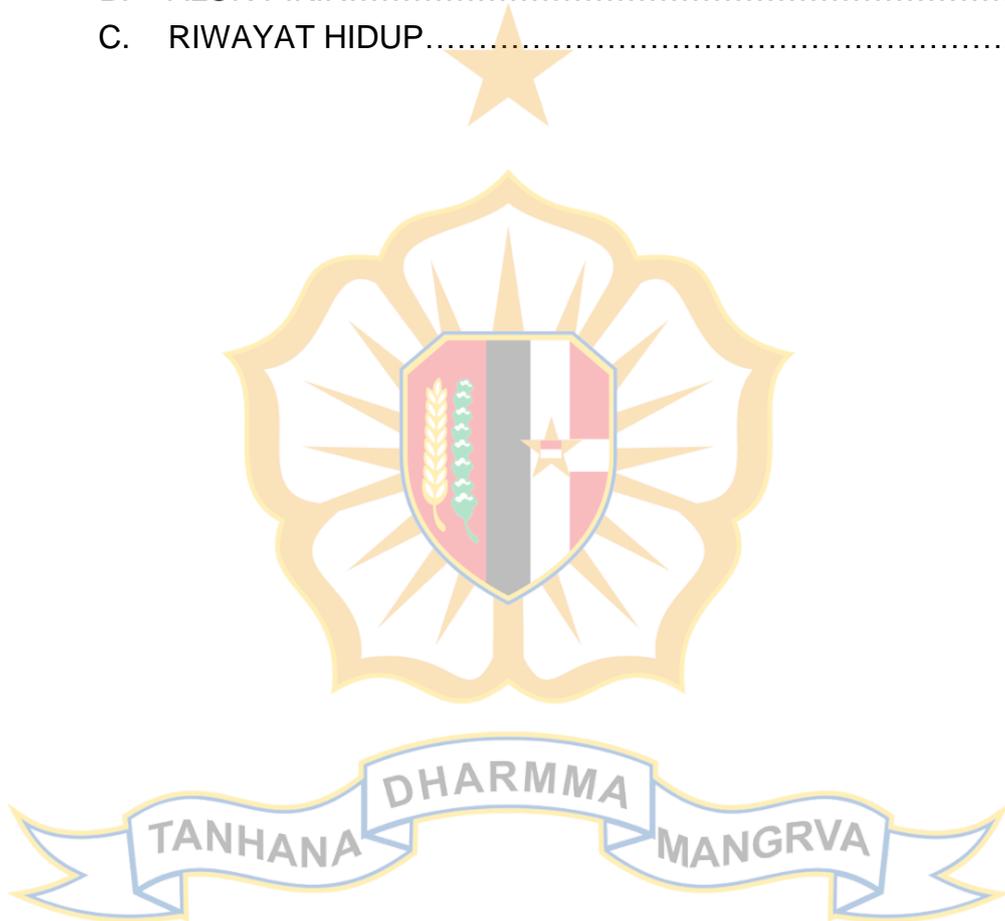


MAYJEN TNI GUNUNG ISKANDAR
T.A. PENGKAJI BID POLITIK

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
PERSYARATAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan	8
5. Metode dan Pendekatan.....	9
6. Pengertian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
7. Umum	11
8. Pembelajaran Abad 21	
9. Asesmen Nasional.....	13
10. Perundang-Undangan.....	15
11. Data dan Fakta.....	16
12. Kerangka Teoritis.....	20
13. Diskripsi Teori	21
14. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Internal	23
15. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Eksternal	25
BAB III PEMBAHASAN	28
16. Umum	28
17. Tahapan Reorientasi Peran Pendidikan Nasional Indonesia ...	28
18. Keselarasan Reorientasi Pendidikan Nasional Indonesia dengan Skenario 2045	43
19. Meningkatkan Peran <i>Stakeholder</i> Pendidikan	46
20. Langkah Strategis Reorientasi Pendidikan	49

BAB IV PENUTUP	58
20. Simpulan.....	58
21. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	xii
A. POLA PIKIR.....	Xiii
B. ALUR PIKIR.....	Xiv
C. RIWAYAT HIDUP.....	xv



DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 1. Kemampuan Peserta Didik Di Indonesia Terkait Membaca Matematika dan Sain Di Bandingkan Negara Asean Lainnya.....	2
2. Perkiraan Jumlah Penduduk Indonesia Pada Tahun 2010-2035.....	4
3. Jumlah Sekolah dan Pertumbuhannya	17
4. <i>Internal Factor Analysis Summary (EFAS)</i>	29
5. <i>Eksternal Factor Analysis Summary (IFAS)</i>	30
6. PDB Indonesia Berdasarkan Sektor Kontribusi (% Kontribusi)	32
7. Strategi Merubah Orientasi Lama Kedalam Reorientasi Pendidikan Mewujudkan Generasi Emas	44
8. Perbandingan Jumlah Ruang Kelas Dengan Kondisi Baik Pada Semua Jenjang Pendidikan di Indonesia Antara Sekolah Negeri dan Swasta.....	53
9. Jumlah dan % Perpustakaan Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah TA 2018/2019.....	55



DAFTAR GRAFIK

	Hal
GRAFIK 1. Kemampuan Peserta Didik Di Indonesia Terkait Membaca Matematika dan Sain Di Bandingkan Negara Asean Lainnya.....	2
2. Perkiraan Jumlah Penduduk Indonesia Indonesia Pada Tahun 2010-2035.....	4
3. Perubahan Kebutuhan Keterampilan Tenaga Kerja.....	5
4. Jumlah Peserta Didik, Tahun Ajaran 2019/2020	17
5. Kompetensi Guru.....	18
6. Infrastruktur Sekolah Tidak Memadai	18
7. Akses Internet.....	19
8. Perbandingan Populasi Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	33
9 Perbandingan Populasi Perkotaan dan Pedesaan.....	34
10. Perubahan Pangsa Pasar Tenaga Kerja Dimasa Depan.....	35
11. Kebutuhan Peningkatan Anggaran Pendidikan Di Indonesia	50
12. Perbandingan Jumlah Ruang Kelas Dengan Kondisi Baik Pada Semua Jenjang Pendidikan di Indonesia Antara Sekolah Negeri dan Swasta	54
13 Jumlah dan % Perpustakaan Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah TA 2018/2019.....	55



DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 1. Konsepsi Pengelola Bonus Demografi Melalui Reorientasi Pendidikan	20
2. Kuadran Analisis SWOT	31
3. Diagram Matriks Analisis SWOT.....	31
4. Kuadran Identifikasi Stakeholder Menurut Bryson.....	46
5. <i>Milestone</i> Reorientasi Peran Pendidikan Mewujudkan Generasi Emas.....	56



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Amanat pendidikan bagi pembangunan nasional Indonesia termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pembukaan alenia IV dan pasal 28 C. Pendidikan menjadi sarana transformasi sosial di Indonesia, karena memiliki konsekuensi terhadap produk inovasi pendidikan yang dihasilkan. Pendidikan memiliki peranan strategis dalam proses pembangunan generasi penerus bangsa karena dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Sistem pendidikan nasional yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, ditujukan untuk mendidik generasi penerus bangsa yang mampu mengatasi semua permasalahan yang sedang dihadapi bangsa. Selain untuk mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan bangsa, peran sistem pendidikan nasional juga berfungsi sebagai sebuah sistematisasi usaha kongkrit dalam upaya mengatasi perubahan secara geopolitik dan geostrategis, sehingga melaluinya diharapkan kebutuhan bangsa terkait generasi penerus yang berdaya saing dan berkompeten dapat diwujudkan melalui transformasi pengetahuan yang berkelanjutan¹.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, "Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional". Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap komponen bangsa haruslah terlibat didalamnya, sehingga dibutuhkan peranan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) menghasilkan kebijakan yang baik dan terukur, guna mencapai tujuan tersebut².

Hasil survei yang diterbitkan pada Maret tahun 2019 lalu dari 79 negara, Indonesia berada di urutan 74³, Sementara kemampuan pelajar di Indonesia

¹ Sudarsana, Ketut, "Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia", 2015.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf (diakses 1 Agustus 2021)

dibidang membaca, matematika dan sains menempati urutan dibawah negara Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam dan Thailand.

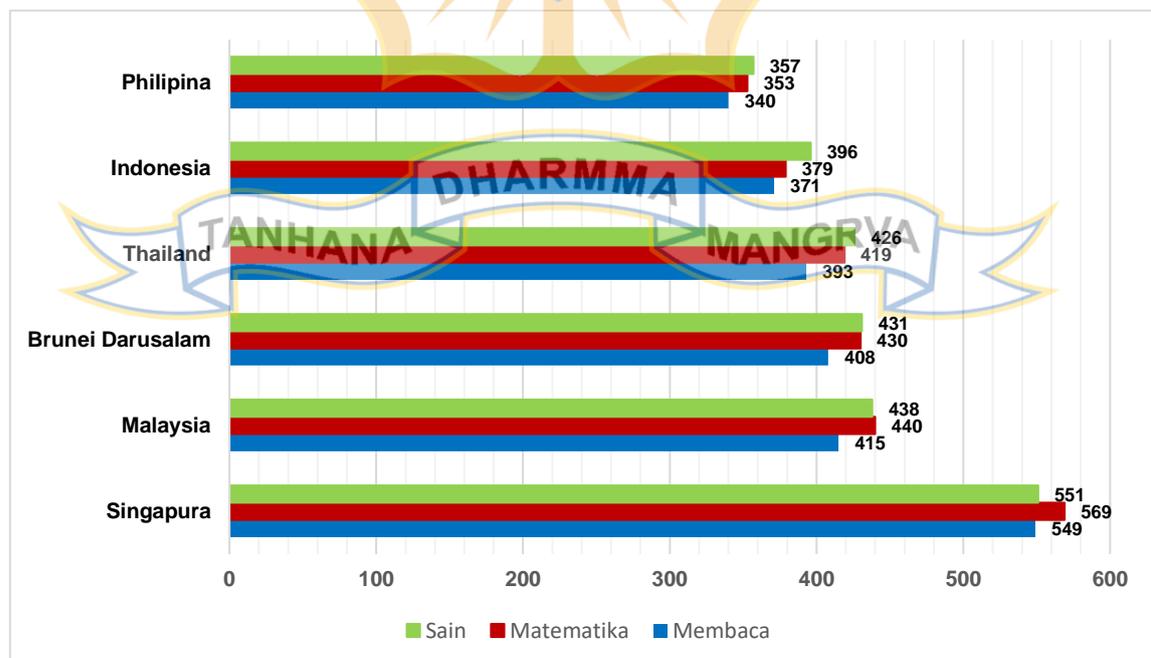
Hal ini setidaknya menjelaskan bagaimana potret kondisi pendidikan yang terjadi di Indonesia dan menunjukkan bahwa kualitas nilai belajar membaca, matematika dan sains peserta didik di Indonesia memiliki nilai kemampuan dibawah peserta didik anggota ASEAN lainnya.

Tabel 1.
Kemampuan Peserta Didik Indonesia
Terkait Membaca, Matematika dan Sain di Bandingkan Negara Asean

Negara	Membaca	Matematika	Sain
Singapura	549	569	551
Malaysia	415	440	438
Brunei Darusalam	408	430	431
Thailand	393	419	426
Indonesia	371	379	396
Philipina	340	353	357
Rata-rata Negara OECD	487	489	489

(Sumber: *Programme for International Student Assessment (PISA) 2018*)

Grafik 1.
Kemampuan Peserta Didik Indonesia
Terkait Membaca, Matematika dan Sain Di Bandingkan Negara Asean



Pendidikan nasional, telah melakukan pergantian kurikulum sebanyak 11 (sebelas) kali, pada saat ini berlaku kurikulum 2013, dan merupakan kurikulum yang

diterapkan dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Perapan kurikulum 2013 secara langsung memberikan peran pendekatan saintifik dan *High Order Thinking Skills (HOTS)*, dapat menjadikannya sebagai inti dalam kurikulum. Meskipun demikian dukungan penerapan HOTS dalam sistem pembelajaran di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan akibat dukungan dari pendukung pendidikan belum maksimal tersedia. Jika kita melihat negara Singapura yang berhasil menerapkan kurikulum pendidikannya dengan mengedepankan pemahaman konsep terhadap mata pelajaran bahasa, matematika dan sains saja. Peserta didik di negara Singapura hanya menghabiskan 60% waktunya untuk memahami mata pelajaran yang disebut "*Big Two*" yaitu konsepsi literasi dan konsepsi numerasi, selebihnya mereka menggunakan waktu untuk mempelajari pelajaran yang diminati saja⁴.

Hal ini berbeda dengan pola pengajaran yang ada di Indonesia yang masih berorientasi pada metode yang tidak tepat. Di Indonesia pola pembelajarannya mengedepankan metode menghafal, memahami dan mengaplikasikan, metode pembelajaran di Indonesia ini merupakan hirarki terendah dari kemampuan berfikir dari teori "Taksonomi Benjamin Bloom". Selain itu pada level kelas menengah, peserta didik di Indonesia dibebankan dengan banyaknya mata pelajaran lain yang harus dikuasai sehingga peserta didik merasa terbebani dengan mata pelajaran yang tidak mereka sukai.

Fakta lain menyebutkan bahwa jumlah lulusan SMA/SMK/MA setiap tahun berjumlah sekitar 3,7 juta orang, namun hanya 1,8 juta orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya sedangkan ada 1,9 juta dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan daya serap perguruan tinggi, dan para lulusan sekolah menengah yang masuk lapangan kerja tanpa bekal kompetensi yang maksimal, dan terpaksa harus bersaing dengan lulusan perguruan tinggi. Kondisi ini seharusnya menjadi tolak ukur komitmen pemerintah dalam memaksimalkan peran pendidikan⁵.

Pada tahun 2045 Indonesia diperkirakan mendapatkan "bonus demografi" yaitu dimana berubahnya komposisi penduduk usia muda lebih mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan penduduk berusia lanjut, sehingga menimbulkan

⁴ R. Arifin Nugroho, *High Order Thinking Skills, (HOTS)*, 2019

⁵ Masih Banyak Lulusan Sekolah Menengah tak Lanjut Kuliah - News+ on RCTI+ (rctiplus.com)

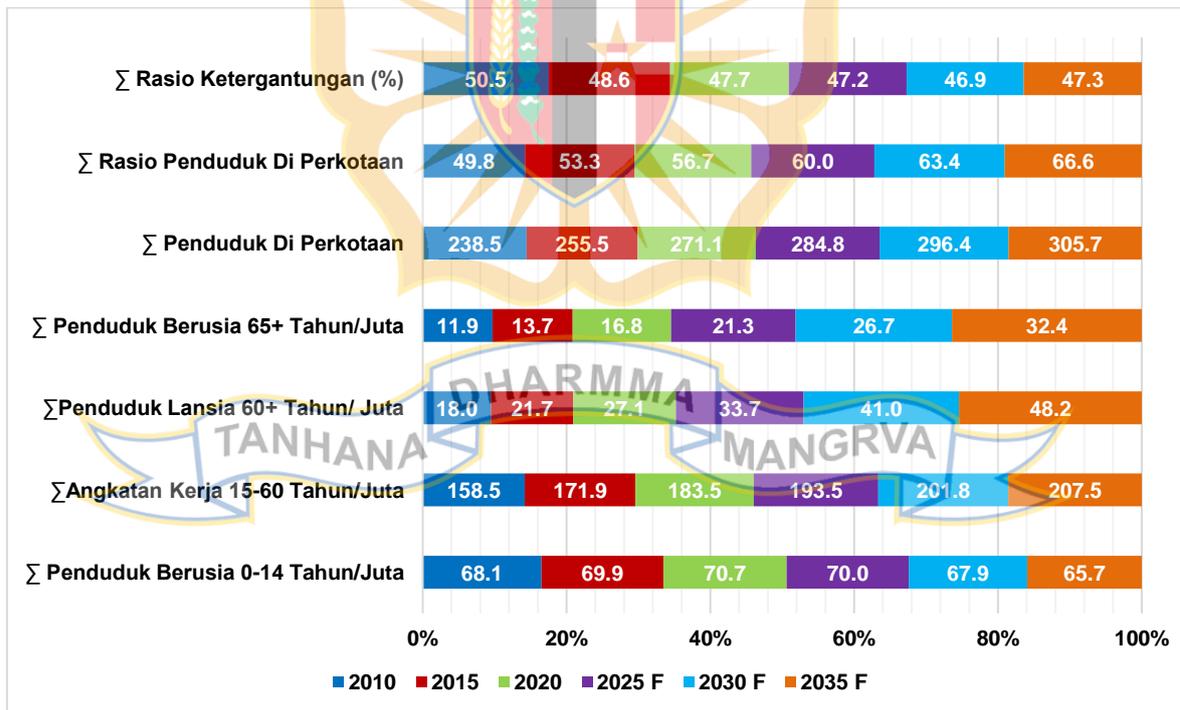
jumlah angkatan kerja menjadi lebih besar, perubahan komposisi ini dapat dilihat pada penjelasan tabel berikut ini⁶:

Tabel 2.
Perkiraan Jumlah Penduduk Indonesia
Pada Tahun 2010-2035

Kriteria	2010	2015	2020	2025F	2030F	2035F
∑ Penduduk Umur 0-14 Tahun, Juta	68,1	69,9	70,7	70,0	67,9	65,7
∑ Angkatan Kerja 15-60 Tahun, Juta	158,5	171,9	183,5	193,5	201,8	207,5
∑ Penduduk Lansia 64 Tahun, Juta	18,0	21,7	27,1	33,7	41,0	48,2
∑ Penduduk Berusia 65 Tahun, Juta	11,9	13,7	16,8	21,3	26,7	32,4
∑ Total, Juta	238,5	255,5	271,1	284,8	296,4	305,7
∑ Penduduk Di Perkotaan (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6
∑ Rasio Ketergantungan (%)	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3

Sumber data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jumlah penduduk pada tahun 2010 merupakan data per Juni 2010

Grafik 2.
Perkiraan Jumlah Penduduk Indonesia
Pada Tahun 2010-2035



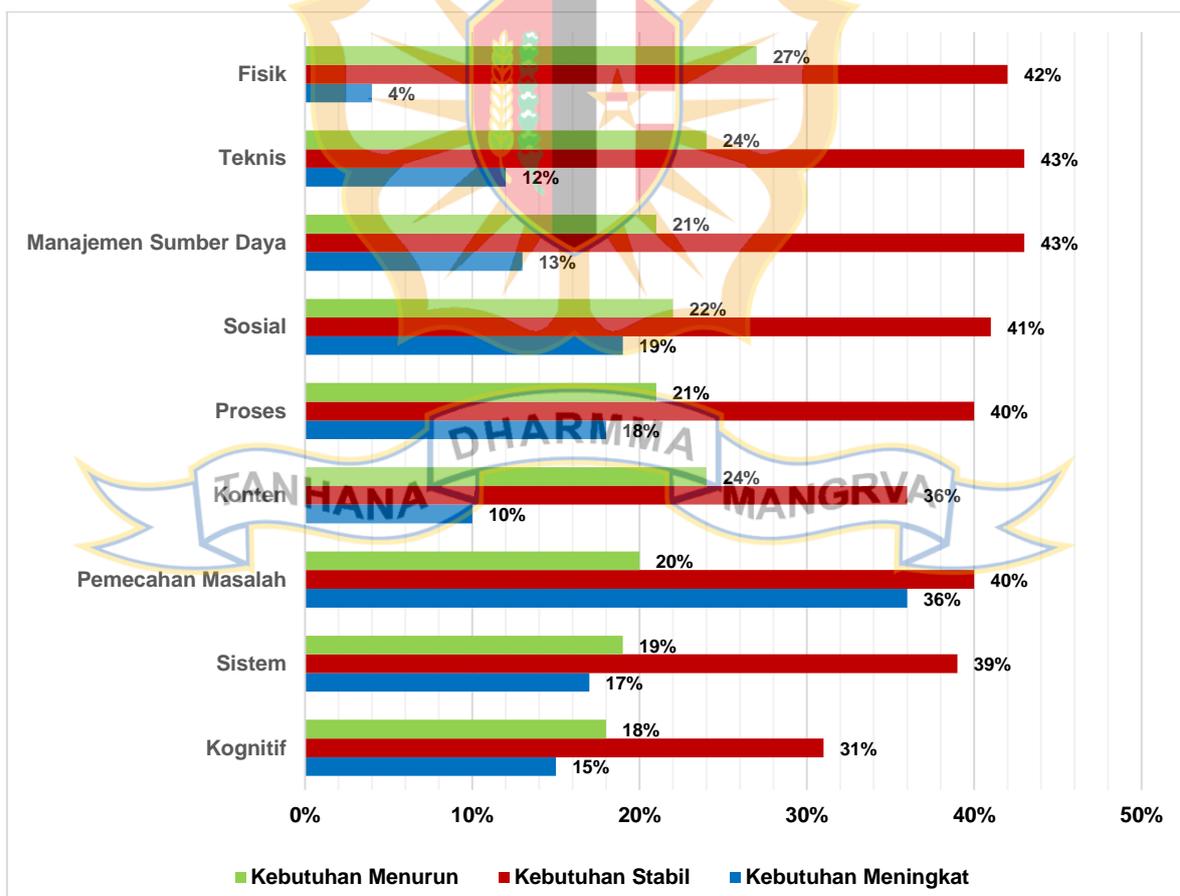
Tantangan lain datang dari dunia kerja yang akan datang, dimana dunia kerja akan mengalami perubahan yang secara signifikan, dari sisi struktural akan banyak memunculkan jenis pekerjaan baru yang mengakomodasi kebutuhan manusia dan

⁶ Peta Jalan Generasi Emas 2045, 2017

teknologi, selain itu juga bonus demografi ini akan memunculkan 5 (lima) generasi umur akan bekerja bersama. Lebih lanjut dalam analisa yang dilakukan oleh Keamey menjelaskan bahwa perubahan kebutuhan keterampilan tenaga kerja meliputi kemampuan berfikir pemecahan masalah, (*cognitif solving problem*) dan sosialisasi adaptif akan semakin menjadi penting, karena keterampilan teknis digantikan dengan teknologi. Sementara perubahan waktu kerja akan semakin fleksibel dengan perbandingan pekerja tidak tetap (*freelancer*) rasionya meningkat, sehingga pekerja memiliki pengawasan tinggi terhadap karier pekerjaan mereka, dan kemajuan teknologi menyederhanakan rutinitas pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, karena akses dan pengolahan data semakin masif⁷.

Berikut penjelasan mengenai kebutuhan keterampilan tenaga kerja, dijelaskan pada tabel berikut ini.

Grafik 3.
Perubahan Kebutuhan Keterampilan Tenaga Kerja



⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisa Keamey, Bahan Ajar Lemhannas (2021:5-6)

Sejatinya terkait analisa Keamey di atas, sistem pendidikan di Indonesia sudah selayaknya mengalami perubahan, diakibatkan oleh: 1) Perekonomian Indonesia akan berubah, 2) Perubahan sosial kultural dan demografi Indonesia berubah. 3) Gambaran pasar tenaga kerja berubah, dan 4) Arah dan visi Indonesia 2045.

Dalam menyikapi hal tersebut, dibutuhkan tindakan kongkrit dari pemerintah guna menghadapinya. Untuk itu, Mendikbud Nadiem Makarim memberikan paparannya dengan Komisi X Bidang Pendidikan Dewan Permusyawaratan Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam paparan Mendikbud Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa: 1) Tahun 2021, UN akan diganti dengan Asesmen Nasional. 2) Tes dan penilaian adalah kedaulatan sekolah karena hanya sekolah yang mengetahui kompetensi anak dan kearifan lokalnya. 3) Tindakan ini dilakukan guna melakukan rekonstruksi terhadap sistem pendidikan nasional yang tengah berjalan, dengan melakukan pemotretan keadaan yang sesungguhnya terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu Asesmen Nasional dilakukan agar tenaga pendidik dan sekolah dapat memperbaiki mutu pembelajaran, 4) Asesmen nasional tidak digunakan sebagai seleksi peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Mengacu apa yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tersebut, sesungguhnya pemerintah Indonesia, harus berusaha melakukan suatu langkah strategi guna memberdayakan peran pendidikan agar dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengelolaan “bonus demografi”, sehingga memberikan kemanfaatan bagi pembangunan nasional, karena jika tidak termanfaatkannya bonus demografi tersebut justru akan menjadikannya beban pembangunan bagi Indonesia, dikarenakan bonus demografi itu sendiri menjadi *idle capacity* yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah “**Bagaimana Reorientasi Peran Pendidikan Nasional Untuk Mewujudkan Generasi Emas**”.

Untuk melakukan reorientasi pendidikan di Indonesia diperlukan langkah yang kongkrit dan konsisten agar strategi membangun sistem pendidikan yang baik

di Indonesia dapat direalisasikan dengan sempurna, maka pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam kajian dalam taskap ini meliputi:

a. *Bagaimana tahapan reorientasi peran pendidikan Indonesia?*

Dalam banyak kajian, diskusi dan literasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat dipetakan berbagai masalah yang terdapat dalam sistem pendidikan di Indonesia, hal inilah yang pada akhirnya mendorong lahirnya kebijakan dilakukan reorientasi peran pendidikan nasional. Untuk itu perlu diketahui bagaimana tahapan pengoperasional reorientasi tersebut.

b. *Apakah reorientasi peran pendidikan nasional untuk mewujudkan generasi emas sudah selaras dengan skenario 2045?*

Hal ini berkaitan reorientasi peran pendidikan dengan keselarasan 4 (empat) buah skenario Indonesia 2045 yang merupakan proyek inovasi ke masa depan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) mengenai beragam kemungkinan yang akan terjadi tepat di Usia ke 100-Tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2045.

c. *Apa peran stake holder pendidikan yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan generasi emas?*

Hal ini berkaitan dengan koordinasi antar lembaga, dimana pemangku kebijakan pada *leading sector* pendidikan yang merupakan domain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mendapatkan dukungan dan *support* dari pemangku kebijakan lembaga negara lainnya, sehingga langkah-langkah optimalisasi dapat dilakukan meliputi:

- 1) Anggaran Pendanaan Pendidikan
- 2) *Grand Design* Pendidikan (Kurikulum)
- 3) Tenaga Pendidik (Guru)
- 4) Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- 5) Aksestabilitas Pendidikan

3. Maksud dan Tujuan Penulisan

a. Maksud

Maksud dari penulisan taskap yang berjudul reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas ini adalah untuk memberikan gambaran analisa strategi bagaimana pendidikan dapat mewujudkan

generasi emas sebaiknya dilakukan dan kesiapan Indonesia dalam mengelola bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2045 melalui pendidikan.

b. Tujuan

Tujuan penulisan taskap berjudul reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas ini adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan nasional guna mengatasi permasalahan dan kelemahan serta ancaman dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan taskap ini dibatasi pada reorientasi peran pendidikan secara makro dari jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah, atas dan kejuruan untuk mewujudkan generasi emas. Keselarasan antara reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas dengan kajian skenario 2045 yang dilakukan oleh Lemhannas. Serta optimalisasi peranan pemangku kebijakan, (*stakeholder*), dalam mengoptimalkan peran pendidikan di Indonesia guna menghasilkan generasi emas, dalam menyikapi bonus demografi pada tahun 2045.

b. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan taskap ini, akan menguraikan tata urutan penulisan yang dituangkan lengkap disertai penjelasan dalam bentuk narasi disertai penjelasan secara ringkas sehingga terlihat dengan jelas satu kesatuan yang koheren.

- 1) **Bab I: Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi pada pendidikan di Indonesia sehingga perlu dikaji dalam penulisan taskap ini.
- 2) **Bab II: Tinjauan Pustaka.** Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka berisikan literasi yang meninjau pokok bahasan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan meliputi 3 (tiga) pokok yaitu: tinjauan umum, yang berisikan penjelasan mengenai asesmen

nasional, peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis dan tinjauan pustaka.

3) **Bab III: Pembahasan.** Bab menguraikan kajian terhadap pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah yang dikaji dengan pendekatan teoritis serta alat analisis yang digunakan meliputi *SWOT Analysis* dan *Stakeholder Analysis*, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

4) **Bab IV: Penutup.** Bab ini menyimpulkan secara ringkas tentang temuan dari pertanyaan-pertanyaan kajian dan saran serta pendapat yang diperoleh dari kajian dengan menggunakan alat analisis yang ada.

5. Metode dan Pendekatan

Taskap ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis dengan menggunakan studi literatur, dengan menyajikan data dan informasi dari berbagai sumber serta bahan ajar selama mengikuti pendidikan di Lemhannas:

a. Data Primer

Sumber data primer didapati dengan menggunakan tehnik kuesioner, forum diskusi group, wawancara langsung, guna mendapatkan informasi dalam menjawab perumusan masalah yang ada.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh kajian pustaka, buku-buku literasi, bahan ajar, dan catatan resmi, pihak lain yang menunjang penulisan taskap ini.

6. Pengertian

Pengertian adalah bagian kata atau istilah yang digunakan dalam penulisan taskap ini, yang dianggap penting dan belum dianggap lazim berkaitan dengan tulisan dan perlu diperjelas dengan memberikan definisi operasional agar tidak menimbulkan salah penafsiran.

a. **Reorientasi.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reorientasi diartikulasikan sebagai peninjauan kembali wawasan dalam menentukan sikap pandangan atau menitik beratkan⁸.

⁸ <https://kbbi.web.id/orientasi>

b. **Pendidikan Nasional**, Proses pembelajaran yang diupaya oleh pemerintah dengan tujuan mencerdaskan dan mendidik generasi penerus melalui suatu perangkat pendidikan (kurikulum) tenaga pengajar, sarana prasana yang menunjang satu proses pembelajaran, yang meliputi semua jenjang pendidikan.

c. **Generasi Emas**, Sumber daya manusia (*human capital*) yang didik melalui sebuah tranformasi sistem pembelajaran, pengetahuan serta kemampuan melalui sebuah proses pendidikan yang akhirnya mampu membentuk generasi yang memiliki integritas yang baik, karakter sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, dan memiliki kompetensi di bidangnya, mudah beradaptasi dengan perubahan dan mampu menggunakan kemajuan teknologi digital, serta memiliki kecerdasan komprehensif, yakni kecerdasan untuk bekerja produktif, inovatif dan mampu berinteraksi sosial dengan baik dan berperadapan unggul sehingga pada gilirannya nanti dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

d. **PISA**, (*Programme for International Student Assessment*) adalah program OECD untuk penilaian siswa internasional. PISA mengukur kemampuan anak berusia 15 tahun untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains mereka untuk memenuhi tantangan kehidupan nyata⁹.

e. **OECD**, (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas¹⁰.

⁹ www.oecd.org

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam menetapkan masalah penelitian dan pembahasan mengenai reorientasi peran pendidikan nasional mewujudkan generasi emas, maka dalam Bab ini, akan memeriksa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan. Beberapa teori dasar inti dan tinjauan pustaka juga akan diartikulasikan untuk memberikan kerangka teoritis dan dasar logis dimana reorientasi peran pendidikan nasional akan mampu mewujudkan generasi emas bagi bangsa Indonesia.

8. Pendidikan Abad 21

Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Dunia kerja menuntut perubahan kompetensi. Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi menjadi bagian kompetensi penting dalam memasuki kehidupan abad 21.

Kang, Kim, Kim & You (2012) mencatat bahwa perubahan standar kinerja akademik terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan pertumbuhan ekonomi global. Perubahan standar menuntut penyesuaian dunia pendidikan dalam menyiapkan peserta didik. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan komunikasi antar anggota masyarakat dan dunia kerja yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pertumbuhan ekonomi global menuntut persaingan yang semakin ketat dalam setiap aspek kehidupan, pasar tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, namun diubah menjadi pasar global. Siswa abad 21 perlu dibekali dengan kemampuan TIK dan mencermati perkembangan ekonomi global. Proses pembelajaran harus mengakomodir hal tersebut.

Sementara, Rotherdam & Willingham (2009) mencatat bahwa kesuksesan seorang siswa tergantung pada kecakapan abad 21, sehingga siswa harus belajar untuk memilikinya. Partnership for 21st Century Skills mengidentifikasi kecakapan abad 21 meliputi: berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Berpikir kritis berarti siswa mampu mensikapi ilmu dan pengetahuan dengan kritis, mampu memanfaatkan untuk kemanusiaan. Trampil memecahkan masalah berarti

mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam proses kegiatan belajar sebagai wahana berlatih menghadapi permasalahan yang lebih besar dalam kehidupannya. Keterampilan komunikasi merujuk pada kemampuan mengidentifikasi, mengakses, memanfaatkan dan mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Terampil kolaborasi berarti mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan sinergi. Sedang menurut National Education Association untuk mencapai sukses dan mampu bersaing di masyarakat global, siswa harus ahli dan memiliki kecakapan sebagai komunikator, kreator, pemikir kritis, dan kolaborator.

Selaras dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kemajuan pada pendidikan di abad 21 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, dalam proses pembelajaran. Industri menuntut perubahan kompetensi tenaga kerja untuk dapat berpikir kritis, dapat melakukan *problem solving*, serta berkolaborasi antar sesama, menjadi kebutuhan pada dunia kerja saat ini. Pembelajaran harus menyelaraskan *link and match* dengan menyetengahkan kombinasi antara kognitif dan kemampuan interaksi sosial, sebagai prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan empat pilar pendidikan universal, yang meliputi:¹¹

a. *Learning to know or learning to learn*

Memberikan gambaran yang menjelaskan proses pembelajaran tidak tertuju nilai test yang diperoleh melainkan di terjemahkan dalam bagaimana proses belajar tersebut berproses.

b. *Learning to do*

Memberikan pemahaman bagaimana mengikuti sebuah proses pembelajaran saja tidak cukup tetapi dapat berbuat sesuatu dari apa yang dipelajari, lebih bermanfaat dan memberikan manfaat.

c. *Learning to be*

Memberikan proyeksikan bahwa dengan belajar dapat membentuk sebuah karakter kepribadian sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai seorang individu yang memiliki personalisasi diri yang memiliki rasa tanggung jawab, dan perikemanusiaan.

d. *Learning to live together*

¹¹ UNESCO *Futures of Education*

Memberikan refleksi pentingnya hidup dalam kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat global baik secara pribadi maupun kelompok.

Dasar pemikiran perkembangan pembelajaran abad 21 yang dikemukakan Kang, Kim, Kim & You (2012), Rotherdam & Willingham (2009) dan Mendikbud Nadiem Makarim ini menjadikan landasan teori bagi bahan kajian dalam Bab ini yang meliputi dasar bagi pelaksanaan asesmen nasional, kajian perundang-undangan, data dan fakta kondisi pendidikan di Indonesia, kajian teoritis serta tinjauan pustaka yang dapat menggambarkan dan memberikan penjelasan secara holistik tentang penjelasan Bab II ini.

9. Asesmen Nasional

Asesmen Nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah serta kejuruan di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid.

Terdapat 3 (tiga) tujuan utama dari asesmen nasional ini. Pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) komponen penilaian dalam asesmen nasional tersebut yang meliputi:¹²

a. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Penilaian ini ditujukan bagi semua peserta didik agar mampu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dan juga digunakan sebagai alat untuk mengukur secara mendalam pada penguasaan konten pembelajaran yang telah dilaluinya yang meliputi¹³:

- 1) Kemampuan Literasi

¹² <https://jejakparlemen.id/rangkuman/>

¹³ Asesmen Nasional (kemdikbud.go.id)

Kemampuan untuk memahami, teks tulisan dan bacaan sehingga maksud teks bacaan tersebut dapat diterjemahkan dikaji kemudian di refleksikan sebagai sarana mengembangkan kapasitas individu, dalam berkomunikasi.

2) Kemampuan Numerasi

Kemampuan numerasi adalah kemampuan memahami dan berfikir dengan menggunakan angka dan logika matematika sebagai acuan dalam melakukan pemecahan permasalahan yang relevan sehari-hari.

Sedangkan bentuk soal yang diberikan dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian.

b. Survei Karakter (SK)

Penilaian yang dilakukan guna mendapatkan informasi hasil belajar sosial-emosional peserta didik, termasuk implementasi dari nilai-nilai dari Pancasila.¹⁴ Aspek yang diukur dalam survey ini meliputi berakhlak mulia dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

c. Survei Lingkungan Belajar (SLB)

Penilaian lingkungan belajar dilakukan bertujuan untuk menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah yang sesungguhnya¹⁵. Survei ini akan diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan guru secara mandiri tanpa pengawasan dalam waktu empat hari. Bagi guru maupun kepala sekolah yang mengajar dan memimpin di lebih dari satu sekolah, maka akan mengikuti survey di setiap sekolah. Jika terdapat kepala sekolah yang merangkap jabatan sebagai guru, maka akan mengikuti dua instrument survey yang berbeda.

Asemen nasional pendidikan hadir sebagai sebuah langkah strategis dari pemerintah guna merubah paradigma serta orientasi pemikiran dari pembangunan pendidikan nasional Indonesia yang mengadopsi pelaksanaan *document sustainable development goals* (SDGs), yang di tanda-tangani oleh 190 negara, termasuk Indonesia pada 21 Oktober 2015. Karenanya SDGs diperuntukan penuntasan permasalahan khususnya di bidang pendidikan di negara berkembang

¹⁴Kupas tuntas Asemen Nasional, Imas Kursiasih S.P.d, (2021:44)

¹⁵ibid

seperti Indonesia. Hadirnya asesmen nasional pendidikan merupakan suatu langkah strategis dari pemerintah dalam melakukan reorientasi pendidikan nasional guna membangun sistem pendidikan nasional Indonesia dalam mempersiapkan generasi mendatang sebagai *human capital* kunci dalam membangun negara dan bangsa.

10. Perundang-Undangan

Upaya pemerintah dalam melaksanakan proses pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5), yang merupakan rangkaian operasional dari Pasal 28 C UUD 1945 yang meliputi¹⁶:

a. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”

b. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

c. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

d. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

e. Bunyi Pasal 31 ayat (5) UUD 1945

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Hal ini mempertegas bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi pembentuk karakter bangsa berdasarkan keimanan ketakwaan serta ahlak mulia berdasarkan sendi-sendi agama yang dianut dengan segala

¹⁶ UUD 1945,

konsekuensi biaya yang ditimbulkannya untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam pengoperasionalannya proses pendidikan yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tersebut maka dibentuk undang-undang lain agar amanat pasal tersebut berjalan dalam koridor yang dikehendaki¹⁷.

a. UU 20/2003 Tentang Sisdiknas

Seperangkat aturan yang digunakan sebagai acuan dalam mengatur rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan, untuk meraih capaian dari pendidikan¹⁸.

b. UU 14/2005 Tentang Guru dan Dosen

Seperangkat aturan perundang-undang yang mengatur tugas dan kewajiban tenaga pendidik di Indonesia dalam menjalankan fungsinya.

c. UU 23/2014 Tentang Otonomi Daerah

Seperangkat aturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan di wilayahnya.

11. Data dan Fakta

Dalam laporan yang disampaikan oleh Unesco, di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, menyatakan bahwa, permasalahan pendidikan yang terjadi di negara berkembang adalah permasalahan aksestabilitas pendidikan dan issue gender dimana anak perempuan di daerah pedesaan diperlakukan diskrimatif dalam hal memperoleh kesempatan belajar di sekolah, hal ini menyebabkan perkembangan pendidikan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia berjalan stagnan¹⁹. Potret Pendidikan Indonesia 2019, merupakan kajian kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan hasil Susenas di Indonesia.

a. Data Kondisi Pendidikan di Indonesia

1) Pertumbuhan Jumlah Sekolah

Persentase pertumbuhan jumlah sekolah masih belum signifikan terutama untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Baru tingkat Sekolah Menengah Pertama yang memiliki pertumbuhan di atas 2%.

¹⁷Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M. Pd, Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu.

¹⁸UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁹ <https://www.dw.com/id/unesco-peringatkan-krisis-pendidikan-dunia/a-17394084>

Hal ini disinyalir karena meningkatnya jumlah lulusan SD. Selain itu, Selain itu, dengan diterapkannya aturan PPDB berbasis zonasi maka sekolah lebih memprioritaskan siswa dengan kartu keluarga atau domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Tabel 3.
Jumlah Sekolah dan Pertumbuhannya

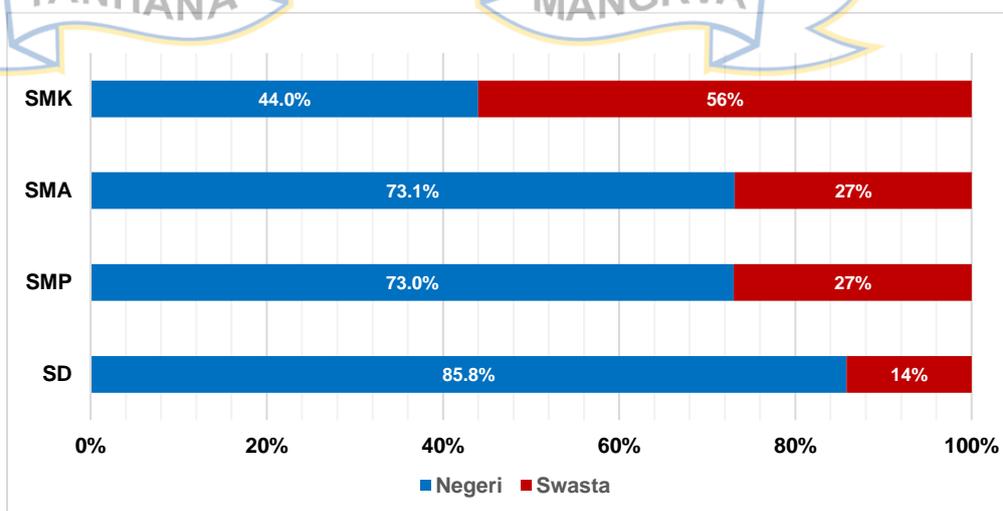
Status Sekolah	Jumlah Sekolah		Pertumbuhan Sekolah (%)	
	2018/2019	2019/2020	2018/2019	2019/2020
SD	148.673	149.435	0,29	0,51
SMP	39.637	40.559	1,74	2,33
SMA	13.692	13.939	1,46	1,80
SMK	14.064	14.301	2,58	1,69

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020)

2) Jumlah Peserta Didik

Jumlah peserta didik mengikuti pola yang sejalan dengan pola jumlah sekolah negeri dan swasta. Sebagian besar peserta didik bersekolah pada sekolah negeri daripada swasta. Pertimbangan biaya sekolah yang lebih rendah karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah menjadi salah satu daya tarik dari sekolah negeri. Peserta didik di sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, dan SMA lebih didominasi oleh sekolah negeri, sedangkan jenjang SMK didominasi oleh sekolah swasta.

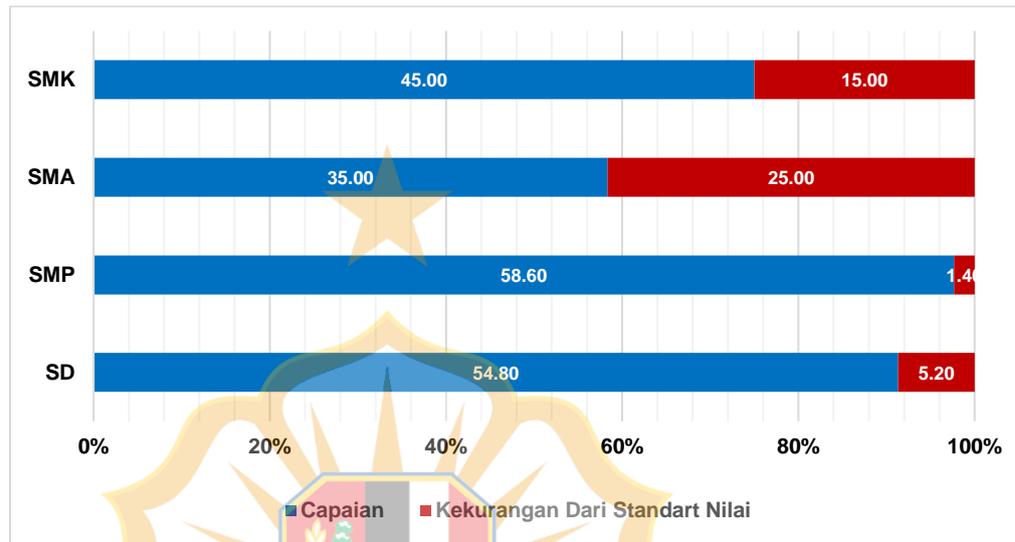
Grafik 4.
Jumlah Peserta Didik, Tahun Ajaran 2019/2020



3) Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)

Hasil penilaian dari Uji Kompetensi Guru (UKG), yang dilakukan pada tahun 2019, belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 60%.

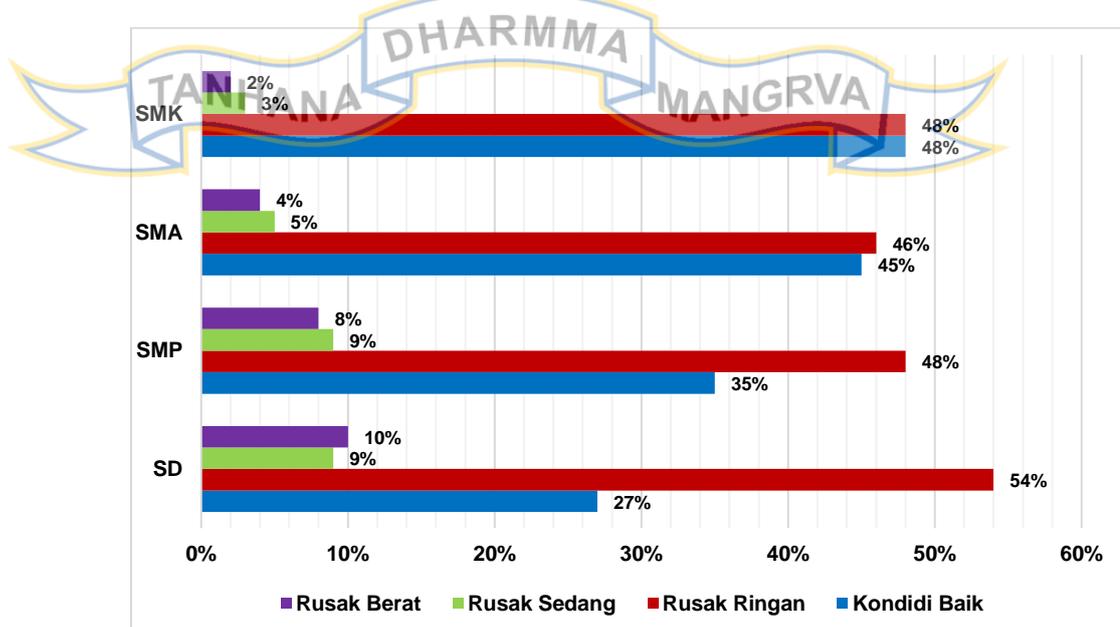
**Grafik 5.
Kompetensi Guru**



2) Infrastruktur Sekolah

Jumlah sekolah rusak ringan di setiap jenjang pendidikan membuat proses belajar tidak berjalan maksimal, dan menyebabkan rendahnya nilai hasil belajar peserta didik.

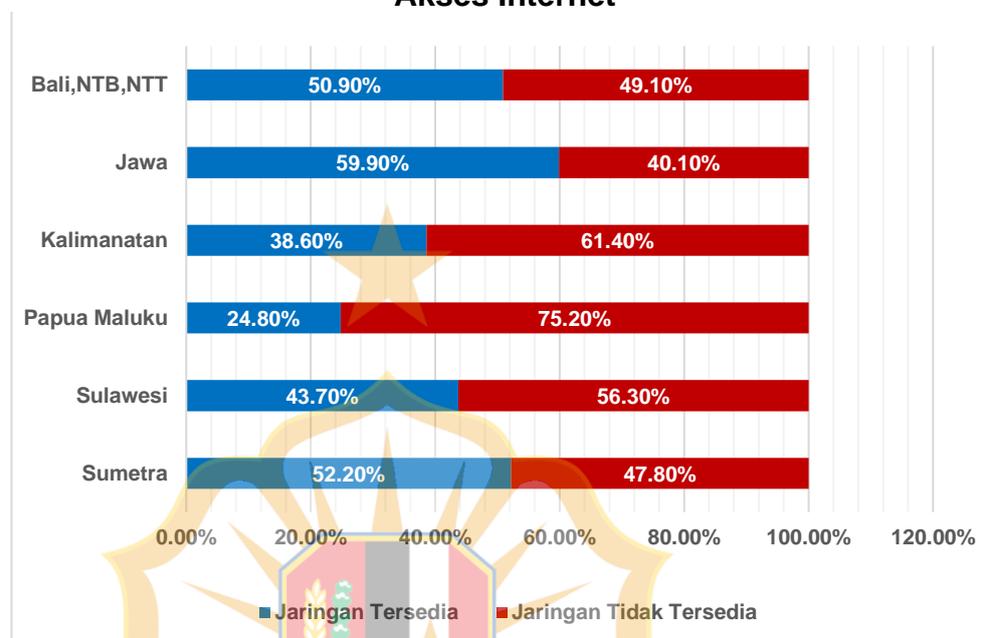
**Grafik 6.
Infrastruktur Sekolah Tidak Memadai**



3) Akses Internet Sekolah

Lebih dari 45% sekolah di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua, tidak memiliki jaringan internet.

Grafik 7.
Akses Internet



b. Fakta Metode Pembelajaran Selama Masa Pandemi

Pandemik *Corona Virus Disaster 19* (Covid-19), telah merubah metode pembelajaran, sekolah-sekolah tutup dan menjalankan proses pendidikan mengharuskan beradaptasi dengan sistem digital dengan melakukan pembelajaran secara daring. Terkait pandemik Covid-19 ini, Mendikbud Nadiem Makariem, menerbitkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

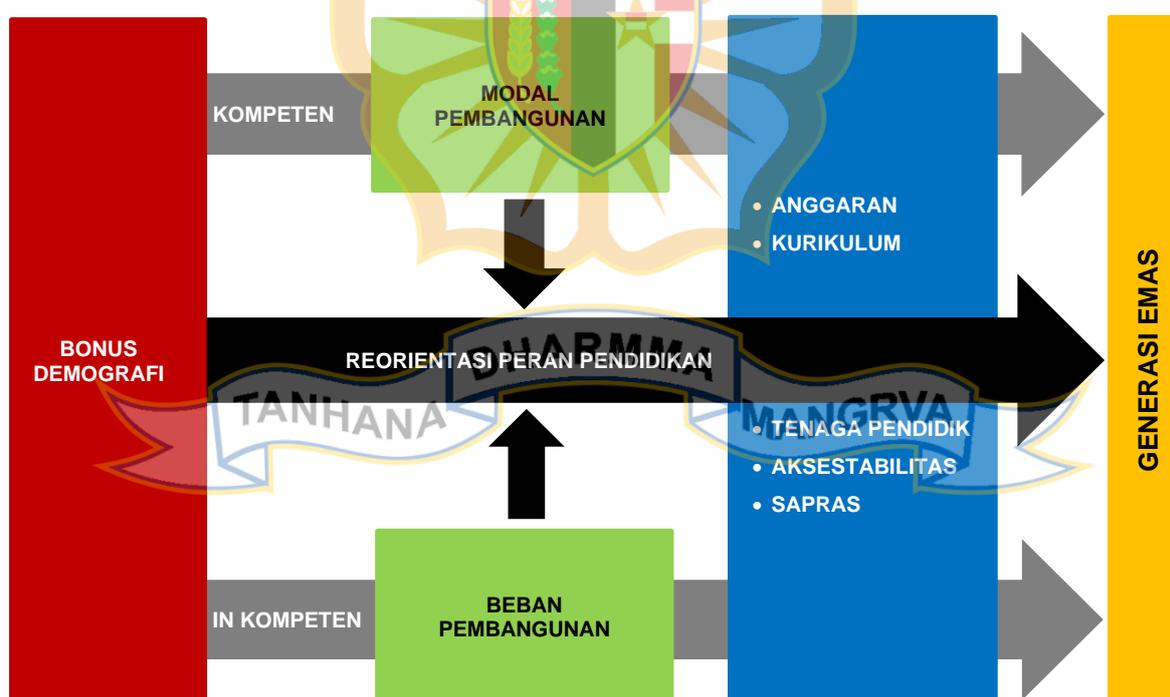
SE 04/2020 tersebut memberikan petunjuk bagaimana proses pembelajaran di lakukan peserta didik melalui pembelajaran daring, untuk tetap melaksanakan proses pendidikan. Pembelajaran dengan metode daring ini menggunakan perangkat komunikasi, dengan konektivitas yang dilakukan melalui jaringan internet, dengan dukungan teknologi 4G²⁰.

²⁰ Strategi Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 Halaman 1 - Kompasiana.com

Melalui metode belajar daring ini ini, Mendikbud Nadiem Makariem telah menjelaskan 4 (empat) hal penting, yakni²¹: 1) Pembelajaran secara daring ini, dapat dilakukan secara interaktif dan non interaktif. 2) Pendidik dalam hal ini berperan dalam memberikan materi pembelajaran dan pemahaman kepada peserta didik dengan muatan mengenai kecakapan hidup, yang menjelaskan tentang pandemi Covid-19. 3) Pembelajaran metode daring di rumah masing-masing peserta didik disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 4) Penilaian dari proses belajar harus diberikan oleh guru dengan tujuan memberikan motivasi belajar bagi peserta didik.

12. Kerangka Teoritis

Dalam rangka mempersiapkan bonus demografi 2045, diperlukan perspektif pembangunan pendidikan, guna menghasilkan SDM yang berkualitas tercapai. Asesmen nasional pendidikan hadir sebagai langkah awal dari reorientasi peran pendidikan, dengan memetakan berbagai permasalahan yang ada pada sistem pendidikan nasional.



Gambar 1.
Konsepsi Pengelola Bonus Demografi Melalui Reorientasi Pendidikan

²¹ Muhammad, Hamid. 2020. Strategi Belajar Kemendikbud di Masa Pandemi COVID-19. [Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/q9oz63380/strategi-belajar-kemendikbud-di-masa-pandemi-covid19](https://republika.co.id/berita/q9oz63380/strategi-belajar-kemendikbud-di-masa-pandemi-covid19) (diakses pada 25 Juni 2021).

Konsepsi reorientasi peran pendidikan tersebut adalah upaya mengelola bonus demografi sehingga memiliki kompetensi yang berupa kecakapan, sehingga menjadikannya modal pembangunan. Sementara reorientasi juga diupaya agar bonus demografi yang *in kompeten* dapat di transformasikan, sehingga menjadi modal pembangunan tentu saja hal ini dilakukan dengan melakukan reorientasi peran pendidikan nasional, sehingga pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Investasi dalam pendidikan sebagai upaya melakukan transformasi generasi penerus sebagai komponen integral dari upaya pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan pengelolaan *human capital* yang memadai.

a. Orientasi Pendidikan Di Indonesia

Selama ini paradigma orientasi pendidikan di Indonesia adalah, setiap peserta didik diharapkan bisa menghafal, bukan memahami konsep sebuah pembelajaran.

b. Kualitas Hasil Didik

Hasil survei yang dilakukan oleh PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik di Indonesia tertinggal oleh beberapa negara negara di kawasan Asia Tenggara.

c. Rendahnya Kesejahteraan Pendidik

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, karena sampai sekarang Pemerintah Daerah masih memberikan upah yang sangat minim. Dengan alokasi anggaran yang minim, sulit untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

d. Mengutamakan Kualitas Bukan Kuantitas Mata Pelajaran

Metode pembelajaran sekolah di Indonesia tidak menyesuaikan dengan kebutuhan diluar sekolah, bahkan sistem pendidikan nasional tidak berhasil mengembangkan kreativitas peserta didik.

e. Reorientasi Peran Pendidikan

Merubah orientasi pendidikan yang ada saat ini menjadi reorientasi peran pendidikan yang dapat mewujudkan generasi emas, bagi bangsa dan negara Indonesia.

13. Diskripsi Teori

a. Manajemen Pendidikan

Pembangunan pendidikan nasional harus berfokus kepada penguatan keunggulan bangsa dalam era globalisasi yaitu penguatan mutu dan keunggulan daya saing sumber daya yang dihasilkan melalui proses pendidikan yang profesional. Pengelolaan sistem pendidikan yang baik ditentukan oleh kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh dua faktor utama yaitu²²: 1) Pemahaman para pengambil kebijakan terhadap konsep kebijakan yang dilahirkan. 2) Kualitas pembuatan kebijakan itu sendiri, dengan berpedoman pada basis data, dan informasi yang dikumpulkan melalui riset.

Dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan, dilakukan dengan memenuhi komponen yang terdiri dari²³: 1) Menciptakan dan menyusun tim untuk melaksanakan kebijakan, 2) Mengartikulasikan tujuan legislasi sebagai dasar bagi aturan pelaksanaan dan kerangka kerja team. 3) Melakukan koordinasi terhadap pembiayaan bagi tim dan kelompok sasaran. 4) Mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan dampak kebijakan.

b. Analisa SWOT

Analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman²⁴. Analisis SWOT yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses), dan ancaman (threats)²⁵. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu strengths, opportunities, weaknesses, threats. Dalam kajian taskap ini analisis SWOT

²² Ace Suryadi 2019. Membangun Meritokrasi Pendidikan Indonesia

²³ Bambang Ismaya, Didik Supriyadi (22:2020), Manajemen Kebijakan Pendidikan

²⁴ Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Indeks, 2009), hal.63

²⁵ Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 19

digunakan untuk menentukan ke arah mana pembangunan pendidikan nasional dan untuk menetapkan sasaran ke depan.

14. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Internal

Lingkungan strategis pendidikan Indonesia di terjemahkan pada Visi Pendidikan Indonesia Tahun 2045 yaitu *membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila*²⁶.

Dalam mewujudkan visi pendidikan tahun 2045, peranan pemerintah merupakan kunci bagi tercapainya penyelenggaraan sistem pendidikan yang baik yang menjadi perhatian yang harus dicermati meliputi:

a. Regulasi Bidang Pendidikan

Regulasi yang menaungi bidang pendidikan yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah berusia hampir 20 tahun. Regulasi ini ditengarai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, perubahan paradigma serta perubahan kebijakan negara lain. Selain itu, perundang-undangan bidang pendidikan juga terjadi ketidaksinkronan serta ketidakharmonisan antara satu dengan lainnya, baik dalam materi muatan maupun dalam implementasinya, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Bahkan, juga terjadi tumpang tindih sistem peraturan dan tanggung jawab sektor Pendidikan. Maka, perlu satu nafas keutuhan undang-undang dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional serta tidak terjadinya parsialisasi dalam perundang-undangan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

b. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang diberlakukan di Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak pembenahan di berbagai aspek. Meski pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan sistem pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat beberapa kelemahan di beberapa sisi. Seperti salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dengan penerapan sistem zonasi pada siswa yang ingin

²⁶ Kemendikbud, Bahan Ajar Lemhannas (2021:29)

mendaftar. Pada faktanya, kebijakan ini memiliki pro dan kontra. Upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan dengan membaurkan siswa dengan nilai akademis tinggi dengan tidak. Memang secara teori dapat meningkatkan kualitas siswa secara merata, namun bukan tidak mungkin siswa yang awalnya pintar justru malah ikut terjerumus ke tempat yang tidak semestinya. Kemudian, gaya pengajaran yang kurang kreatif dan hanya menumpukan pendidikan pada sistem hafalan tanpa memahami juga menjadi permasalahan yang membutuhkan jalan keluar. Oleh karena itu, dibutuhkan perombakan yang berani agar kualitas pendidikan di Indonesia menunjukkan trend positif.

c. Kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik

Pada kondisi saat ini kurikulum dikembangkan melalui pendekatan linear, yang berisikan konten, dengan fokus kegiatan secara akademik melalui pendekatan standarisasi dimana, harapan kedepannya perkembangan kurikulum bersifat fleksible yang dikembangkan berdasarkan kompetensi dengan fokus pengembangan peserta didik kepada *soft skill*.

Namun saat sekolah kekurangan tenaga pendidik yang mau untuk mengajar di daerah pedalaman. Ada sebagian yang menganggap bahwa mengajar disana gajinya kecil, jauh dari ibu kota. Pada akhirnya semua itu di kembali lagi kepada tenaga pendidik yang dengan sukarela mengajar anak-anak di pedalaman.

Kemudian, kualitas pendidik masih di Indonesia belum mencapai kualitas yang diharapkan, dalam proses pembelajaran peran pendidik sebagai pembimbing (*teacher counsel*), peran pendidik diharapkan dapat harus dapat mengidentifikasi peserta didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya (*remedial teaching*). Selain itu peran pendidik sebagai perancang pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilai hasil pembelajaran peserta didik, pengarah pembelajaran dan pembimbing peserta didik. Lebih jauh, dikemukakan pula tentang peranan tenaga pendidik yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, diri pribadi (*self oriented*), dan dari sudut pandang psikologis. Arahkan kedepannya pendekatan dilakukan secara

heterogen, dimana peserta didik ikut menentukan kegiatan belajar, dengan orientasi pada peserta didik dengan pemanfaatan teknologi²⁷.

Selain itu, Pemerintah memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, Hasil berbagai riset menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan juga menjelaskan, upah tenaga pendidik yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan usaha tenaga pendidik untuk memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik, upah rendah menjadi salah satu alasan mengapa performa kerja tenaga pendidik tidak maksimal.²⁸

d. Aksestabilitas Pendidikan

Di daerah terpencil, terluar dan terisolir di Indonesia dimana kemampuan ekonomis masyarakat sangat minim masih terdapat banyak anak usia sekolah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Aksestabilitas pendidikan berjarak tempuh berkilo-kilo meter dengan kondisi geografis alam ekstrem dan sulit ditempuh dengan menyeberangi laut dan sungai menggunakan perahu ataupun melewati jembatan yang sudah rusak. Pemerataan aksestabilitas pendidikan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pada daerah terpencil, terluar dan terisolir tersebut.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Masih banyak sekolah di daerah-daerah pedalaman Indonesia yang belum dilihat oleh pemerintah. Seakan-akan Pemerintah hanya memfokuskan pendidikan di kota-kota besar di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia ini khususnya di daerah pedalaman yang jauh dari ibu kota. Kondisi pendidikan atau keadaan sekolah yang tak layak pakai, bangunan yang sudah mulai tua ataupun sudah hancur, dan masih banyak lagi. Sekolah yang tak layak pakai akan sangat membahayakan peserta didik dan tenaga pendidik yang berada didalam gedung itu. Membuat peserta didik dan tenaga pendidik merasa tidak nyaman dalam melakukan proses pembelajaran.

15. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Eksternal

Tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan salah satu fokus pada tujuan secara global peningkatan kualitas

²⁷ Peran Guru dalam Pendidikan, AkhmaSudrajat (wordpress.com)

²⁸ Benarkah Kesejahteraan Guru Pengaruhi Kualitas Pendidikan Indonesia? (idntimes.com)

pendidikan. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs. Sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030.²⁹

Pembangunan *human capital* melalui pendidikan dalam menghadapi bonus demografi tahun 2045 terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian yang harus dicermati meliputi:

a. Pandemi *Corona Virus Disaster* (Covid-19)

Corona Virus Disaster (Covid), SARS-CoV-2, pertama kali terdeteksi pada bulan Desember Tahun 2019 di Wuhan China dan menyebar keseluruhan belahan dunia. Dengan tingginya penularan virus ini yang menyebabkan kematian. Temuan kasus pandemik ini pertama kali umumkan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Tidak kurang dari 1,3 juta penduduk Indonesia terserang wabah ini. Terkait hal ini pemerintah Indonesia bersiap membenahi disemua sektor termasuk Pendidikan, Covid-19, belum dipastikan belum akan berakhir³⁰.

b. Revolusi Industri 4.0

Beberapa pendapat para ahli terkait dampak revolusi industri yang telah memasuki tahap 4.0 adalah:

- 1) Menurut McKinsey Global Institute pada tahun 2030 ada 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru, karena digantikan mesin³¹.
- 2) Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro, memasuki revolusi industri 4.0 Indonesia akan kehilangan 50 juta peluang kerja pendapat ini sepaham dengan *McKinsey Global Institute*.
- 3) Menurut Memperindag Airlangga Hartarto, justru sebaliknya. Revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia.

c. Perdagangan Internasional

²⁹ sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4

³⁰ Revolusi Industri 4.0 bagi Indonesia - Bing

³¹ *Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation*, (Desember 2017)

Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia, namun dengan adanya *Trump Effects* diperkirakan akan mendorong keseimbangan baru, termasuk dalam konsep peningkatan *global production network*.

d. Persaingan Penguasaan Sumber Daya Alam

Persaingan memperebutkan SDA ke depan akan tetap tinggi seiring dengan bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi, serta perubahan gaya hidup. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa pengembangan industri nasional diarahkan untuk menjaga dan mengelola SDA dengan inovasi dan teknologi.

e. Kemajuan Teknologi

Pada fase ini, *internet of things* atau otomatisasi dan penerapan teknologi yang bertumpu pada internet dan pertukaran data (*big data*) akan menjadi tren manufaktur yang memungkinkan adanya proses yang lebih efisien dalam proses manufaktur (*smart factory*) dan pengelolaan *value chain*. Smart Factory merupakan sistem manufaktur cerdas yang terintegrasi dengan jaringan komputer. Keamanan siber merupakan kendala karena lebih rentan terhadap serangan dunia maya, karena menggunakan mesin bukan manusia.



BAB III

PEMBAHASAN

16. Umum

Pada bab ini disajikan penjelasan bagaimana seharusnya reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas dilakukan dengan melihat data dan fakta yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia, sehingga perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki kearah yang lebih baik. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan sebagai suatu mekanisme yang dijalankan secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat pemerintah daerah. Adapun mekanisme sistematis ini bertujuan untuk memastikan terimplementasikannya penyelenggaraan pendidikan di seluruh proses sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Implementasi mekanisme penjaminan mutu ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan pada akhirnya kebijakan strategi tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan tersebut.

17. Tahapan Reorientasi Peran Pendidikan Nasional Indonesia

a. Orientasi Peran Pendidikan Nasional Saat Ini

Rendahnya mutu pendidikan yang dihasilkan dari orientasi pendidikan saat ini, merupakan suatu permasalahan khusus yang harus dibenahi. Untuk

mengetahui secara jelas kondisi pendidikan Indonesia saat ini diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisa sistem pendidikan nasional yang selama ini digunakan dalam proses belajar-mengajar masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini penulis menggunakan Analisis SWOT untuk menganalisa berdasarkan kekuatan yang dimiliki dengan melihat kesempatan yang ada, serta melakukan penilaian secara obyektif pada hambatan yang dimiliki, untuk menghindari berbagai ancaman yang ada.

1) Analisis SWOT *Internal Factor Analysis Summary*

Faktor internal yang berpengaruh dimana masing-masing memiliki kontribusi adanya kekuatan dan kelemahan dalam orientasi pendidikan yang saat ini terjadi di Indonesia:

Tabel 4.
Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No	IFAS	NILAI	Peringkat	Score
				Bobot
1	<i>Strengths</i>			
a	Adanya regulasi bidang pendidikan	0,108	8	0,864
b	Nawa Cita Presiden Jokowi	0,081	6	0,486
c	Program Indonesia Pintar	0,111	8	0,888
d	RPJMN PP No. 59 Tahun 2017	0,111	7	0,777
e	CSR/PKBL	0,089	7	0,623
		0,5		3,638
2	<i>Weaknesses</i>			
a	Pandemik Covid-19	0,118	2	0,236
b	Revolusi Industri 4.0	0,069	2	0,138
c	Perdagangan Internasional	0,099	2	0,198
d	Persaingan Penguasaan SDA	0,082	3	0,246
e	Dampak Globalisasi	0,132	3	0,396
	Jumlah	0,500	4	1,214
	Total IFAS	1,000		4,852
	S-W			2,424

2) Analisis SWOT *Eksternal Factor Analysis Summary*

Faktor enternal yang berpengaruh dimana masing-masing memiliki kontribusi adanya kekuatan dan kelemahan dalam penerapan strategis reorinetasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas:

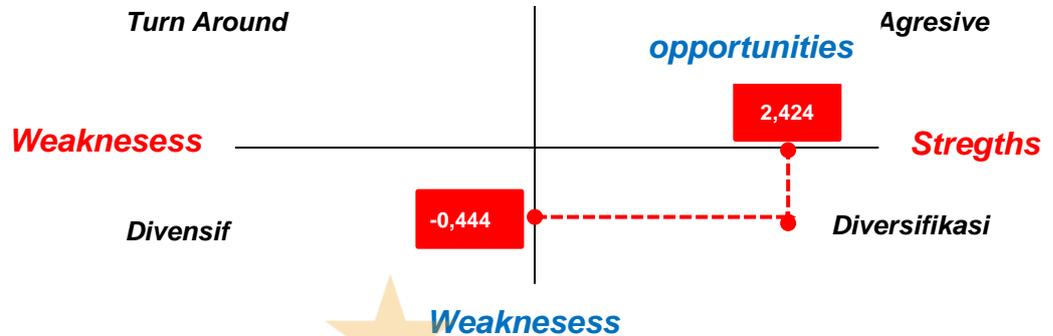
Tabel 5.
External Factor Analysis Summary (EFAS)

No.	EFAS	NILAI	Peringkat	Score
				Bobot
1	<i>Opportunities</i>			
a	SDM yang melimpah	0,117	5	0,585
b	SDA Melimpah	0,092	4	0,368
c	Stabilitas Keamanan, ekonomi dan politik	0,1	3	0,3
d	Perkembangan Teknologi	0,108	4	0,432
e	Kemitraan dengan pihak lain	0,083	4	0,332
	Jumlah	0,5		2,017
2	<i>Threats</i>			
a	Pandemic Covid-19	0,118	3	0,354
b	Persaingan Penguasaan SDA	0,069	5	0,345
c	Dampak Globalisasi	0,099	4	0,396
d	Perdagangan Internasional	0,082	7	0,574
e	Revolusi 4.0	0,132	6	0,792
	Jumlah		0,5	2,461
	Total EFAS		1	4,478
	O-T			-0,444

3) Kuadran SWOT Analisis

Nilai analisis SWOT pada IFAS S-W= nilai **2,424** (positif) dan EFAS O-T = nilai **- 0,444** (negatif) dan berada pada kuadran II, kondisi saat ini **orientasi peran pendidikan** yang terjadi di Indonesia masih memiliki kekuatan dari segi internal, meskipun menghadapi berbagai ancaman. Strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.



Gambar 2. Kuadran Analisis SWOT

Matriks SWOT orientasi pendidikan saat ini berada pada kuadran 5B (IFAS 4,852 dan EFAS 4,478), pada posisi *stability*, horinzotal dengan melibatkan stakeholder pendidikan lainnya.

		SUMBERDAYA INTERNAL		
		KUAT	SEDANG	LEMAH
		9	6	3
PELUANG EKSTERNAL	9	SEL 1 Integrasi Vertikal	SEL 2 Integrasi Horizontal	SEL 3 Penghematan (berbenahdiri)
	6	SEL 4 Carefully Berhati-hati	SEL 5 A Growth SEL 5.B Stability	SEL 6 Retrenchment Captive (Keterkaitan)
	3	SEL 7 Growth Diversifikasi Konsensik	SEL 8 Growth Diversifikasi Konsensik	SEL 9 Retrenchment Likuidasi

Additional values from the diagram: 4,852 is located in the top-right cell of the matrix (SEL 2 area), and 4,478 is located in the bottom-left cell (SEL 4 area).

Gambar 3. Matrik Analisis SWOT

b. Orientasi Peran Pendidikan Nasional Yang Diharapkan

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan orientasi pendidikan diupayakan dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia, maka yang perlu mendapatkan

perhatian khusus dari pemerintahan Indonesia adalah bonus demografi tersebut akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-2040 dimana pada periode tersebut penduduk usia produktif diprediksikan mencapai 64%.

Jika melihat orientasi peran pendidikan dalam pengelolaan sektor pendidikan diberbagai jenjang mengalami disorientasi, maka harus secepatnya perlu dikoreksi kearah sasaran yang diharapkan demi tercapainya generasi emas. Kebutuhan perubahan pradigma peran pendidikan saat ini menjadi reoritasi peran pendidikan didasarkan pada:

1) Perubahan Kebutuhan SDM Unggul

Perubahan-perubahan kebutuhan *Product Domestik Brutto* (PDB) sehingga dibutuhkan SDM unggul dibidang tersebut yang diproyeksikan akan terjadi di Indonesia.

Tabel 6.
PDB Indonesia Berdasarkan Sektor Kontribusi (% Kontribusi)

PDB Indonesia Berdasarkan Sektor (9% Kontribusi)	Berkas			Proyeksi 2030F	% Poin Perubahan	PDB Sektor (2015-2030)
	Sumber Daya	Industri	Layanan			
	1980	2000	2015			
Total USD	78,9	180	861	3.254		
Pertanian & Perikanan	22,1	14,5	14,1	10,5	-4PP	7,2 %
Pertambangan & Utilitas	23,0	12,5	9,2	7,2	-2PP	7,5 %
Industri	12,4	25,2	21,7	16,3	-5PP	7,2 %
Konstruksi	4,8	5,0	9,8	10,2	+ 1 PP	9,6 %
Perhotelan & Retail	18,6	19,7	17,0	18,3	+ 1 PP	9,8 %
Logistik & Komunikasi	5,0	5,4	8,9	10,0	+ 1 PP	10,1
Layanan Lain-lainnya	14,1	17,8	19,3	27,5	+8PP	11,9
PDB/Kapita	522	842	3.3366	11.228		

(Bank Dunia, Reserve Bank of Australia, PP, Economist Intelligence, BPS)

Berdasarkan data analisa yang dilakukan Keamey, dapat dijelaskan bahwa dalam menciptakan SDM unggul yang dibutuhkan dimasa depan tidak bisa diciptakan oleh ilmu yang dibentuk berdasarkan trend masa lalu, sebagai ilustrasi yang dipaparkan dalam

Tabel 6 di atas, dijelaskan bahwa beberapa faktor akan mengalami perubahan:

- a) Pertanian dan perikanan akan mengalami persentase perubahan -4 PP (minus empat).
- b) Pertambangan dan Utilitas -2 PP (minus dua).
- c) Industri -5 PP (minus lima).
- d) Sementara Untuk bidang konstruksi, Perdagangan retail dan perhotelan, Transportasi logistic dan komunikasi mengalami prosesntase poin perubahan masing-masing +1 (plus satu).
- e) Sedangkan layanan lainnya mengalami kenaikan +8 (plus delapan).

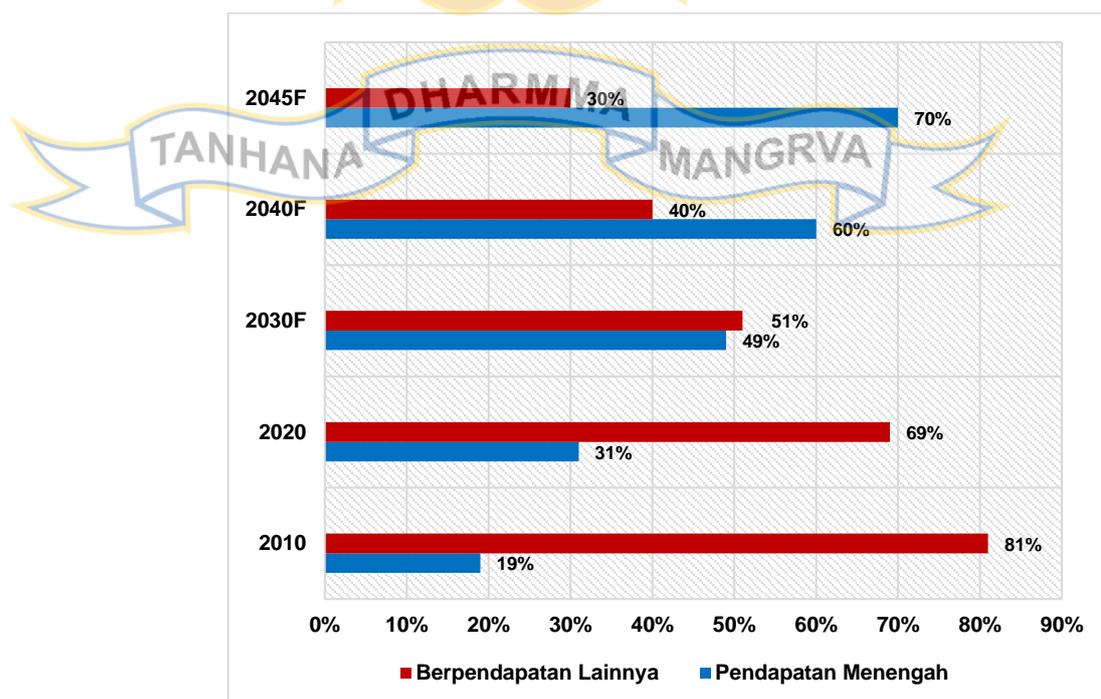
2) Perubahan Demografis

Indonesia diprediksikan akan mengalami perubahan demografis yang signifikan diantaranya:

- a) Meningkatnya kelas pendapatan menengah, yang akan tumbuh ditahun 2040, sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut ini:

Grafik 8.

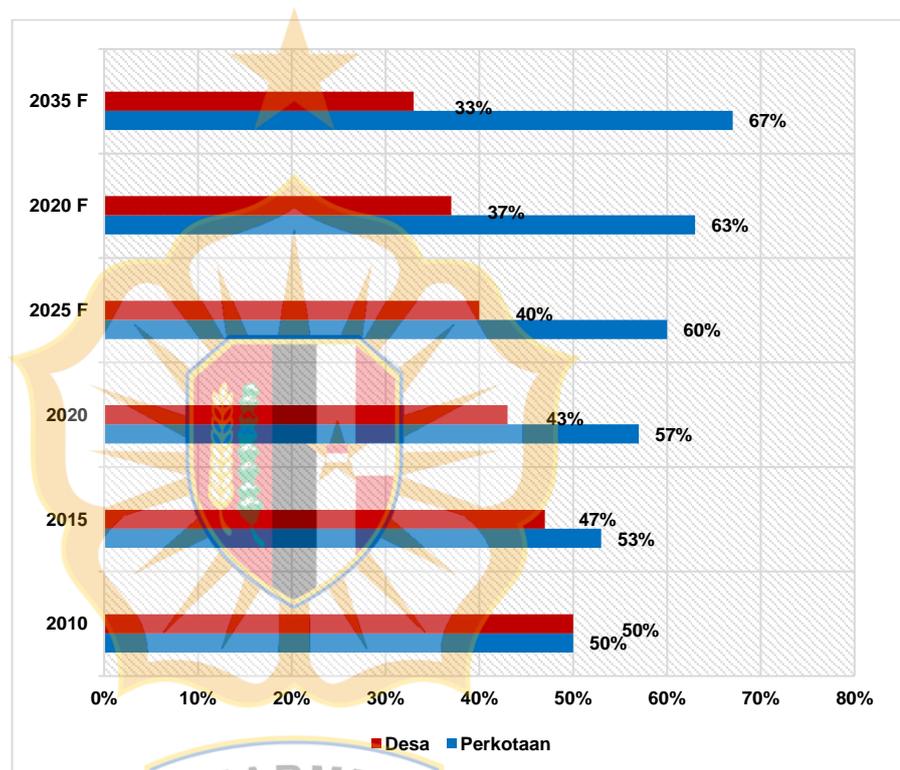
Perbandingan Populasi Berdasarkan Tingkat Pendapatan



b) Pesatnya Urbanisasi

Pesatnya urbanisasi menyebabkan jumlah populasi penduduk di perkotaan lebih banyak dibandingkan populasi yang tinggal di desa, dimana ditahun 2010 populasi penduduk berimbang, sementara di tahun 2015 komposisi populasi desa dan perkotaan mulai bergeser ke perkotaan.

Grafik 9.
Perbandingan Populasi Perkotaan dan Pedesaan

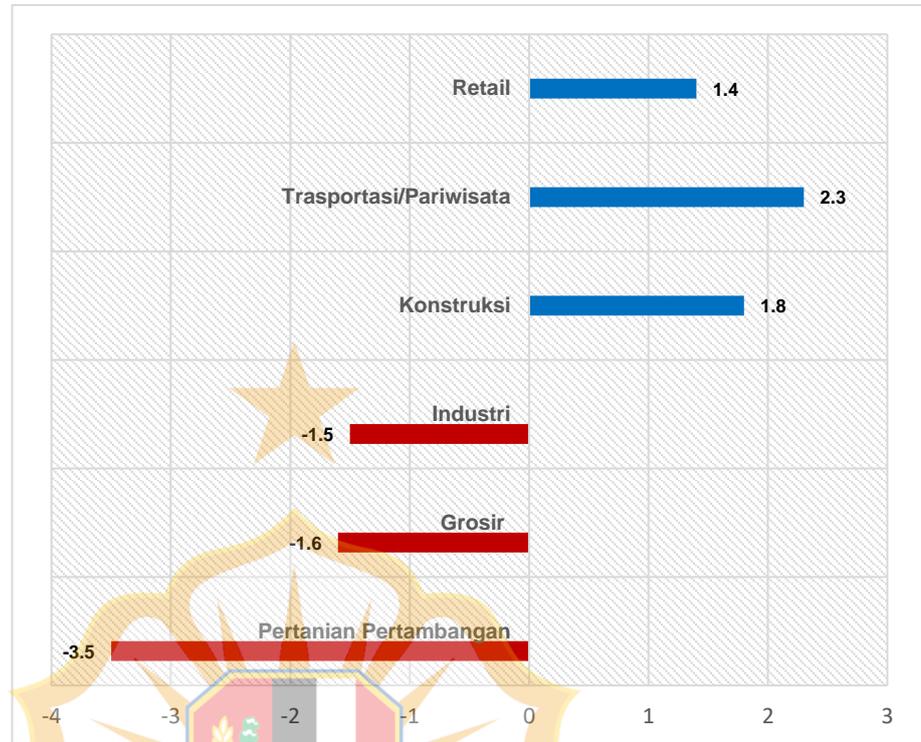


3) Perubahan Pangsa Pasar Tenaga Kerja

Perubahan pangsa pasar berdasarkan sektor:

- a) Pertanian dan Pertambangan mengalami 3,5 juta pekerjaan yang akan tergantikan.
- b) Grosir mengalami 1,6 juta pekerjaan yang akan tergantikan.
- c) Industri mengalami 1,5 juta pekerjaan yang akan tergantikan.

Grafik 10.
Perubahan Pangsa Pasar Tenaga Kerja



Sementara itu, 62% pekerjaan baru akan hadir pada sektor:

- a) Konstruksi akan terdapat 1,8 juta pekerjaan baru akan tercipta.
- b) Transportasi/Pariwisata akan terdapat 2,3 juta pekerjaan baru akan tercipta.
- c) Retail akan terdapat 1,4 juta pekerjaan baru akan tercipta.

c. Strategi Reorientasi Peran Pendidikan Nasional Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat memaksimalkan orientasi peran pendidikan itu sendiri, sejatinya orientasi peran pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi orientasi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan global. Untuk itu dibutuhkan strategi yang me-reorientasi peran pendidikan saat ini menjadi reorientasi peran pendidikan nasional dengan langkah-langkah diversifikasi. Berdasarkan hasil Analisa swot yang sudah dilakukan, yaitu:

1) Revisi Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penataan Undang-Undang Bidang Pendidikan Melalui Pendekatan Omnibus Law

Revisi undang-undang menjadi bagian penting dan utama dalam membenahan tata kelola pendidikan. Sebab mengelola pendidikan perlu ketetapan aturan yang jelas. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dianggap sudah kadaluarsa karena nyaris berusia 20 tahun sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang perlu direspon terutama dalam konteks sumber daya manusia dalam pendidikan, serta adanya inkonsistensi dalam berbagai aturan perundang-undangan dalam pendidikan. Selain itu, tumpang tindih peraturan dan tanggung jawab sector pendidikan juga harus segera diakhiri. Bahkan, Undang-Undang ini juga telah dibuat ketika era sebelum otonomi daerah, sehingga pendekatan pengembangan dan pembinaan pendidikan dilakukan dengan mekanisme pendekatan (*topdown approach*). Berbagai kebijakan pengembangan/pembinaan pendidikan hampir seluruhnya ditentukan oleh Kemendikbud, dalam hal khusus di Propinsi ditentukan oleh Kanwil Kemdibud, dan dalam hal khusus lainnya di Kabupaten/Kota ditentukan oleh Kakandepdikbud, untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran pelaksana di wilayah, termasuk di sekolah-sekolah.

Oleh karena itu, harus ada pembaharuan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Pemerintah dapat melakukan perubahan paradigma pendidikan dan perubahan kebijakan melalui perubahan regulasi dengan pendekatan konsep "Omnibus Law". Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan, perbaikan dan penyempurnaan pasal-pasal, mengakomodasi perkembangan pendidikan dan persaingan global, mengakomodasi kurikulum, asesmen, pendanaan dan pembiayaan pendidikan, serta desentralisasi dan otonomi pendidikan, serta mengakomodasi sisi budaya dan kearifan local. Pengembangan juga diupayakan mengedepankan pengembangan pendidikan dilakukan dengan orientasi pendekatan "dari bawah ke atas" (*bottomup approach*). Selain itu, substansi yang perlu

didekonstruksi dalam konsep sistem pendidikan nasional untuk pendidik (guru) yaitu kesejahteraan guru harus menjadi orientasi utama dalam perbaikan UU Sisdiknas, perubahan paradigma peran guru dimasa mendatang melalui perbaikan UU Sisdiknas, serta dekonstruksi dalam konsep sistem pendidikan nasional untuk pengembangan SDM pendidik (guru). Saat ini, setidaknya ada tiga Undang-Undang (UU) yang harus direvisi, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru & Dosen serta UU Pendidikan Kedokteran. Dengan revisi serta penataan perundang-undangan bidang pendidikan ini, harapannya Kemendikbud dapat melakukan terobosan-terobosan di dunia pendidikan.

2) Penyederhanaan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan

Kurikulum pendidikan dari pemangku kebijakan seperti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan sampai ke daerah, kota, kabupaten, provinsi, memiliki materi yang terlalu banyak. Bahkan, ada dua kurikulum dalam satu sekolah. Hal ini tidak hanya merepotkan siswa, namun juga guru. Sementara, tugas dan pokok fungsi guru masih dibebankan pada persoalan administrasi. Sehingga yang menjadi tupoksi sesungguhnya, berwenang memandatkan, memintarkan murid dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini tidak lain dampak dari kurikulum pendidikan yang ada.

Tidak sinkronnya metodologi dan kurikulum pendidikan akan mengurangi optimalisasi guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara, siswa akan kurang focus dalam memahami materi. Untuk itu, Reorientasi yang dilakukan pada periode ini adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara fleksible, yang didasari kompetensi, yang lebih berfokus pada *soft skill* dan pengembangan karakter. Terobosan penyederhanaan kurikulum tanpa mengurangi esensi dan kualitas pendidikan akan mampu memaksimalkan penyerapan ilmu pengetahuan.

Untuk itu penyusunan kurikulum diupayakan dengan mengadopsi kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh OECD, yaitu *OECD Learning Compass 2030*³², kerangka pemikiran ini nantinya menekankan kepada peserta didik agar dapat mencari dan menemukan kearah mana masa depannya diarahkan, melalui cara yang bermakna dan bertanggung jawab dengan melakukan interaksi bimbingan melalui tenaga pendidik, orang tua, masyarakat dan teman sejawat.

Sementara itu, dalam hal penyederhanaan metodologi juga tidak mengurangi esensi dari kualitas pendidikan. Metodologi pendidikan harus mampu membuat psikologis seorang guru fokus pada upaya mencerdaskan siswa.

3) Penerapan Sistem Pendidikan Terpadu

Pada indeks pendidikan negara ASEAN lainnya, pendidikan di Indonesia masih berada pada posisi 5 terendah. Akibatnya, daya saing yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pun sangat memprihatinkan. Karena itu, dibutuhkan perombakan berani agar kualitas pendidikan di Indonesia menunjukkan trend positif, yang memiliki daya saing tinggi serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan sistem pendidikan terpadu.

Sistem pendidikan terpadu pada dasarnya telah diberlakukan di negara-negara yang maju di bidang pendidikannya, baik di Eropa maupun Asia. Di Finlandia misalnya, yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Berdasarkan hasil dari tes internasional dan penelitian, Finlandia dikenal sebagai negara dengan kualitas kurikulum pendidikan terdepan. Dengan tingkat kelulusan tes internasional tertinggi di dunia, Finlandia berhasil memuncaki indeks pendidikan dari negara di seluruh dunia. Rahasinya adalah terletak pada reformasi pendidikan yang telah diteliti dan diterapkan di sekolah formalnya. Hal serupa juga diberlakukan di Britania, Belanda serta

³² www.oecd.org

Swiss. Di kancah Asia, sistem ini diberlakukan di Jepang, Korea dan juga Singapura.

Pada dasarnya, Konsep pendidikan terpadu berorientasi pada siswa atau student-oriented dan bukan berorientasi pada mata pelajaran atau subject matter-oriented (Buchori, 1995;157). Keterpaduan ini dilihat dari sudut pandang hak setiap anak, juga anak luar biasa untuk memperoleh layanan pendidikan, tidak berbeda dari anak lainnya. Keterpaduan pendidikan menunjukkan pada pendidikan inklusif (inclusive education), yaitu suatu pendidikan yang dilandasi konsep equal education opportunity. Namun memerlukan guru yang mampu dan memiliki keterampilan professional menghadirkan anak luar biasa dengan anak lainnya dalam pembelajaran secara bermakna. Disamping itu agar semua "jenis" peserta didik mampu belajar dengan memfungsikan kemampuannya seoptimal mungkin, diperlukan pembelajaran terpadu.

4) Peningkatan Anggaran Pendidikan

Pembiayaan pendidikan menempati porsi yang signifikan dari APBN, namun secara keseluruhan pembiayaan untuk pendidikan lebih rendah daripada rata-rata negara OECD. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan nasional telah meningkat menjadi Rp. 493 T (~25% meningkat dari 2015). Selisih ~ Rp. 250 T (1,1% PDB) dibandingkan dengan rata-rata negara OECD, periode kedepan anggaran pendidikan di Indonesia diharapkan bisa mencapai 25 % (dua puluh lima dengan melibatkan sektor swasta sebagai alternatif tambahannya).

Selain itu dengan adanya peraturan Kepmeneg BUMN Nomor S-203 yang menyatakan intinya menggerakkan sektor swasta untuk mengeluarkan sebesar 1-4% keuntungannya kepada masyarakat melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Hal ini harusnya diatur agar 1% keuntungan difokuskan untuk memberikan pelayanan *development* di bidang pendidikan, terutama dalam membantu sarana dan prasarana sekolah. Selama ini besaran untuk program PKBL penjelasan hanya pemberian keuntungan

kepada masyarakat, untuk itu masalah teknis besaran 1%, artinya besaran keuntungan besaran dari BUMN belum dibunyikan.

5) Peningkatan Kompetensi Guru

Permasalahan rendahnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG), didasari data dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud yang menyebutkan bahwa dari 1,6 juta guru, hanya 192 orang yang memiliki nilai kompetensi di atas 90, sementara sisanya hanya memperoleh nilai kompetensi 4,7. Di sisi lain, pemerintah dalam restru menargetkan rata-rata nilai UKG guru untuk tahun 2019 rata-rata kompetensi guru 8,0.

Upaya meningkatkan nilai UKG dapat ditempuh dengan mengadakan diklat, *workshop*, seminar-seminar pelatihan yang dirangkai sedemikian menarik agar tenaga pendidik tertarik untuk mengikutinya. Selain itu, pendekatan *Outbound Training* bisa dijadikan pilihan dalam melaksanakan pelatihan bagi para tenaga pendidik.

6) Pemerataan dan kesejahteraan Tenaga Pendidik

Pada permasalahan ini keterbatasan tenaga pendidik terjadi di daerah terpencil, terluar, dan terisolir. Untuk itu dalam hal regulasi penempatan tenaga pendidik pemerintah dapat menerebitkan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur distribusi tenaga pendidik, dimana aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dengan terbitnya Permen tersebut, tenaga pendidik harus siapa dirotasi ke daerah terpencil, terluar dan terisolir. Selama ini tenaga pengajar yang berstatus PNS, berstatus pegawai daerah, sehingga hanya bertugas di daerah provinsi dan kabupaten tersebut. Untuk mengatasi distribusi kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik, rotasi dan mutasi tenaga pendidik harus diberlakukan.

Kemudian, terkait kesejahteraan tenaga pendidik ke depannya dapat dilakukan dengan cara pengangkatan karyawan BUMN misalnya perusahaan Perkebunan Nusantara dan Aneka Tambang yang daerahnya tersebar di daerah perkebunan di wilayah Indonesia.

Dengan bentuk penggajian disesuaikan dengan standar karyawan BUMN, dimana tenaga pendidik lulusan terbaik dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dapat direkrut sebagai tenaga pendidik di daerah operasi perusahaan. Selama ini aturan mengangkat tenaga pendidik menjadi karyawan BUMN, belum diatur karena BUMN berfokus pada kebutuhan karyawan pada operasi bidang usaha mereka saja.

7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, selama ini dibebankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, diversifikasi pengembangan terhadap kebijakan ini dapat dilakukan juga dengan menggunakan metode *fundraising*, penggalangan dana dari masyarakat, alumni, serta tokoh masyarakat.

Dengan adanya penggalangan dana ini masyarakat akan merasa memiliki dan merawatnya, sehingga peningkatan sarana dan prasaran pendidikan betul-betul menghasilkan infrastruktur terbaik.

8) Peningkatan Aksestabilitas

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan luasan bentangan geografis Indonesia mengakibatkan kebutuhan akan pendidikan tidak terjangkau dan aksestabilitas sekolah, disebagian daerah memiliki populasi rendah tidak terbangun, alasan ini yang menjadi dasar tertolaknya pendirian sekolah baru. Selain itu beratnya medan geografis didaerah pedalaman terutama di daerah terluar terpencil dan terisolir menjadikan mobilitas pendidik yang rendah karena lokasi sekolah yang tersebar.

Dalam mengupayakan peningkatan aksestabilitas pendidikan ini dimungkinkan untuk dilakukan:

- a) Bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu diupayakan melalui beasiswa
- b) Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dapat dilakukan melalui bantuan kearifan lokal masyarakat sekitar dan program CSR Swastan dan PKBL BUMN.

9) Pemanfaatan Teknologi

Adanya pandemi Covid-19 memaksa pemanfaatan teknologi informasi secara adaptif pada dunia pendidikan. Sekolah tatap muka tidak dapat dilakukan demi penanggulangan penyebaran covid-19. Sekolah online menjadi tantangan baru pada dunia pendidikan.

Pemanfaat *EDTech* seperti *Start Up* ruang guru, bisa digunakan dengan menggunakan metode pembelajaran daring, atau dengan membuat sendiri materi pembelajaran tersebut dengan melibatkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang tersebut kemudian diaplikasikan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan gadget.

Pembiayaan terkait hal ini, Kemendikbud telah mengalirkan bantuan kuota data bagi sekolah-sekolah, sehingga kedepannya pola ini bisa dijadikan rujukan bagi pengembangannya. Hasil terbaik metode pembelajaran ini nantinya data juga dibagikan kepada daerah-daerah lainnya yang membutuhkan.

10) Menjalin Kerja Sama dengan stakeholder

a) Kerja sama Pemerintah Daerah

Kerjasama dengan pemerintah daerah diupayakan melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasana pendidikan, upaya ini dengan menggunakan usulan yang diajukan kepada Kementerian yang membidangi Infrastruktur dalam hal ini kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Bentuk usulan tersebut bisa diupayakan melalui bantuan anggota dari Komisi V dan Komisi X DPR RI dari daerah masing-masing. Khusus untuk komisi V DPR RI, yang membidani Infrastruktur, usulan-usulan tersebut dipersiapkan dengan rancangan (*predesign*), pengembangan rancangan (*design development*), dan penyusunan DED (*Detail Engineering Design*), sehingga menjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

b) Kerja Sama Luar Negeri

Bentuk kerjasama melalui konsultasi dengan (OECD) terkait kebijakan kajian kebijakan nasional bidang pendidikan di Indonesia. Selama ini bentuk review dari OECD diterima sebagai masukan tanpa dilakukan konsultasi. Untuk itu peran OECD dalam kerjasama juga dapat dilakukan dengan memberikan keleluasaan OECD dapat melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pembangunan sistem pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik.

c) Kerja Sama Dengan BUMN dan Swasta

Terkait kerjasama dengan pihak industri, bentuk kerjasama yang dibangun adalah dengan melakukan vokasi, pelatihan terhadap kebutuhan dunia industry. Hal ini sangat tepat diterapkan kepada sekolah kejuruan. Dengan adanya vokasi tersebut, pihak sekolah dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja dibidang tersebut.

18. Keselarasan Reorientasi Pendidikan Nasional Indonesia dengan Skenario 2045

Keselarasn strategi reorientasi peran pendidikan mengacu kepada skenario 2045 yang dikemukakan oleh Lemhannas RI. Skenario 2045 ini bertitik tolak pada permasalahan yang akan di hadapi pada tahun 2045, yang membutuhkan antisipasi tindakan, dari reorientasi peran pendidikan Indonesia di masa depan³³. Karena itu diharapkan reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas menghasilkan *grand desaign* kurikulum yang merubah orientasi lama ke dalam reorintasi peran pendidikan yang dapat mewujukan generasi emas. Output yang dihasilkan dari grand desain kurikulum ini nantinya akan membentuk SDM yang akan semakin bermartabat dan memiliki daya saing tinggi. sehingga semuanya dapat berjalan dengan bersinergi antara bidang ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan.

Berikut ini dijelaskan dalam tabel 7, bagaimana strategi merubah orientasi pendidikan lama ke dalam reorientasi pendidikan mewujudkan generasi emas.

³³ Skenario Indonesia 2045 - Medcom.id

Tabel 7.
Strategi Merubah Orientasi Pendidikan Lama Ke dalam
Reorientasi Pendidikan Mewujudkan Generasi Emas

No	Orientasi	Strategi	Reorientasi
1	Belajar sebagai kewajiban	Menerapkan kolaborasi & pembinaan	Belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan
2	Sistem tertutup	Membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah	Sistem terbuka kerjasama antar stakeholder
3	Pendidik sebagai penyampaian Informasi	Meningkatkan kualitas pendidik	Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar
4	Pedagogik berbasis konten, kurikulum, dan penilaian	Memperbaiki kurikulum nasional	Pedagogik berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5	Pembelajaran tatap muka manual	Membangun Lingkungan sekolah	Pembelajar berbasis teknologi
6	Program-program didorong oleh pemerintah	Membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah	Program-program yang relevan dengan kebutuhan industri
7	Adminstrasi dan aturan membebani	Menyederhanakan sistem	Kebebasan untuk melakukan inovasi
8	Pihak industri swasta kurang berperan aktif	Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta serta industri	Membuat <i>Link and match</i> pendidikan dengan industri

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi kurikulum merupakan aktualisasi rencana atau program dalam bentuk pembelajaran.

a. Grand Design Kurikulum Berbasis Pendidikan Moral

Keselarasan penerapan kurikulum pendidikan yang berbasis moralitas dan intelektualitas, dengan komposisi sebagai berikut:

1) Pada Level Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)

Kurikulum yang diterapkan adalah 80% kurikulum moral, dan 20% kurikulum ilmu pengetahuan. Penerapan komposisi kurikulum

moral ini lebih dominan untuk membentuk karakter siswa yang memiliki budi pekerti luhur sebagai fondasi dalam kehidupan.

2) Pada Level Menengah Pertama (SMP)

Kurikulum yang akan diterapkan adalah 60% kurikulum moral, dan 40% kurikulum ilmu pengetahuan. Penerapan antar komposisi kurikulum ini hampir seimbang mengingat dalam kondisi ini siswa sedang mengalami masa transisi atau peralihan dari anak menuju remaja dan sedikit demi sedikit sudah dapat mengambil kesimpulan tentang nilai moral baik atau buruk. Dengan komposisi ini kemampuan intelektual berbasis pada moralitas yang kuat.

3) Pada Level Pendidikan Menengah Atas (SMA)/SMK

Kurikulum yang akan diterapkan adalah 20% kurikulum moral, dan 80% kurikulum ilmu pengetahuan. Pada masa ini seorang anak dianggap sudah dapat memiliki kemampuan moral yang matang dan sudah siap menerima komposisi ilmu pengetahuan yang lebih besar dengan mental yang sudah terfondasi sejak dini.

b. Implementasi Revolusi Mental dalam Kurikulum Pendidikan

Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada peserta didik. Revolusi mental di implementasikan dalam kurikulum bertujuan untuk membentuk etos peserta didik. Artinya, membentuk etos bukanlah pembicaraan teori-teori etika yang abstrak, tetapi bagaimana membuat teori-teori tersebut memengaruhi tindakan sehari-hari. Pendidikan diarahkan menuju transformasi di tataran kebiasaan.

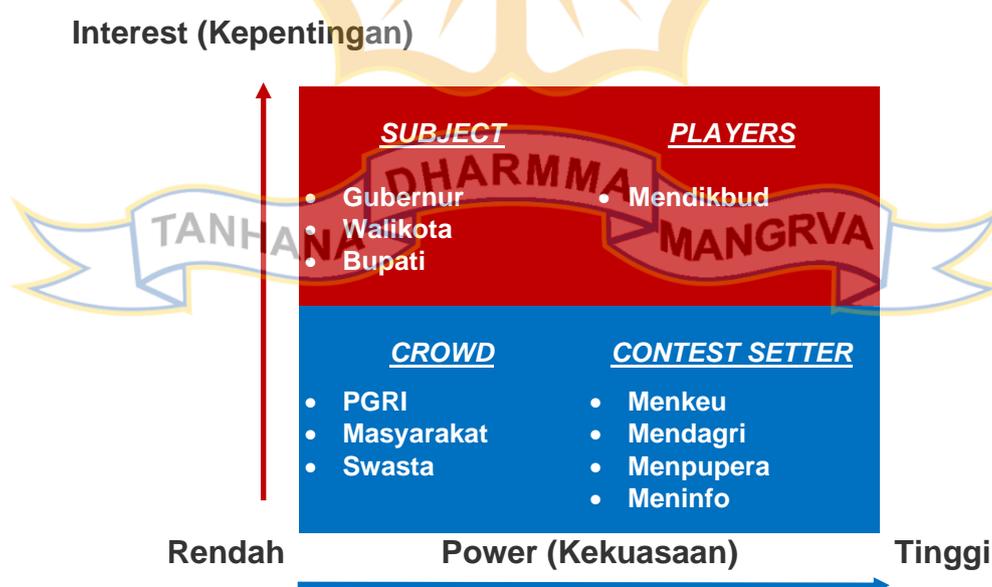
Revolusi mental berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan solusi atas hambatan-hambatan karena rendahnya kualitas pelaksana pendidikan di lapangan baik guru, kepada sekolah, pengawas, siswa dan pemangku kebijakan dalam pendidikan melalui implementasi kurikulum terutama dalam pendidikan dasar.

Dalam hal ini guru dan kepala sekolah bersama-sama mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah dan daerah

masing-masing. Hal tersebut merupakan prasyarat yang mesti dipenuhi dalam mengawali revolusi mental dalam pendidikan, agar perubahan yang dilakukan tidak membingungkan berbagai pihak terkait. Perubahan harus benar-benar terarah mengikuti koridor aturan sehingga tidak hilang arah.

19. Meningkatkan Peran *Stakeholder*

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menyampaikan bahwa pada abad ke-21 ini, perkembangan di sektor teknologi dan informasi, memerlukan transformasi pendidikan secara menyeluruh melalui pergeseran arah manajemen pendidikan yang lebih baik. Pendidikan harus mampu memadukan *link and match* antara kurikulum dan infrastruktur serta sarana pendukungnya, hal ini sudah menjadi agenda nasional dalam menyambut bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2045 mendatang, untuk itu dibutuhkan dukungan segenap stakeholder lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terkait kegiatan. Reorientasi pendidikan dalam mewujudkan generasi emas harus secara serius dan sungguh-sungguh dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder lain diluar Kementerian Pendidikan. Stakeholder untuk kegiatan reorientasi pendidikan mewujudkan generasi emas merupakan kolaborasi antar beberapa lembaga dalam institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, pihak swasta, BUMN, organisasi guru, dan masyarakat yang baik langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya³⁴.



Gambar 4.
Kuadran Identifikasi Stakeholder Menurut Bryson³⁵

³⁴ Bryson, *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques*,

³⁵ *ibid*

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud sebagai *Players* yaitu stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait.

1) *Grand Desain* Pendidikan Penyelarasan Kurikulum

Menyusun dan menyesuaikan kurikulum pada pengembangan kurikulum nasional dengan fokus kepada pengembangan holistik (termasuk karakter peserta didik), dengan perkembangan pembelajaran pedagogik.

2) Peningkatan Kualias Tenaga Pendidik

b. Kementerian Keuangan

Optimalisasi peran Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan meliputi:

1) Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas distribusi anggaran dengan cara meminimalisasi kerugian dalam anggaran menuju penerapan transaksi non tunai.

2) Distribusi anggaran di fokuskan kepada area yang membutuhkan anggaran lebih.

3) Berperan aktif sebagai penunjang, fasilitator dan konsultan untuk pemerintah daerah.

c. Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur di dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

1) Memastikan ketersediaan asset negara yang dapat digunakan untuk membangun sekolah baru.

2) Mamastikan ketersediaan tanah untuk menunjang aksestabilitas pendidikan.

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Memastikan ketersediaan infrastruktur sekolah di seluruh dan aksesstabilas sekolah di semua wilayah terpencil, terluar dan terisolir di wilayah Republik Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Cipta Karya dan Direktorat Bina Penataan Bangunan melakukan Koordinasi Teknis Konsolidasi Data Tingkat Provinsi Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas serta Kejuruan.

e. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran meliputi:

- 1) Memastikan setiap sekolah memiliki komputer dan infrastuktur pendukungnya
- 2) Memastikan cakupan jaringan akses internet yang bagi peserta didik
- 3) Melakukan negoisasi dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar mendapatkan harga paket data yang terjangkau melalui skema subsidi paket data.

f. Gubernur, Walikota dan Bupati

Peran penting pemerintah daerah dalam rangka penguatan otonomi daerah (otda) di bidang pendidikan peningkatkan akses dan mutu pelayanan maka diperlukan peningkatan kompetensi fasilitas mencakup sarana, prasarana, dan sumber daya akreditasi, hal tersebut dapat dilakukan melalui tata kelola kelembagaan pendidikan dengan menyusun skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah, dan industri. Tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam otonomi daerah bidang pendidkan, yaitu

- 1) Pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga negara memperoleh haknya dalam pendidikan.
- 2) Pemberian kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan daerah dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu.

Dasar pelaksanaan 3 (tiga) persoalan mendasar tersebut ada didalam UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, peraturan perundang-undangan ini membawa implikasi bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus didasari oleh pendekatan *bottom up*, hal ini dikarenakan penyelenggaraan manajemen pendidikan sebagai bentuk pelayanan harus diterima oleh masyarakat luas agar sisi tranparan pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.

20. Langkah Strategis Reorientasi Pendidikan

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan di atas, terkait reorientasi peran pendidikan nasional mewujudkan generasi emas bahwa pembagunan SDM unggul yang berdaya saing dan berpengetahuan adalah kunci dalam menghadapi bonus demografi tahun 2045.

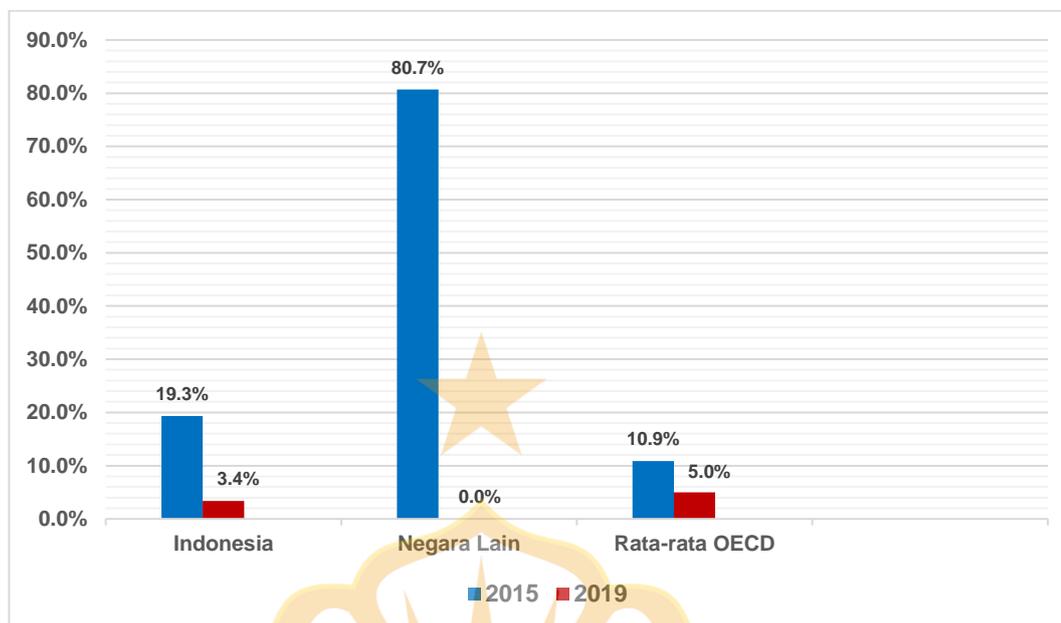
Reorientasi peran pendidikan dilakukan dalam upaya menyelaraskan pola pedidikan agar dapat memanfaatkan bonus demografi tersebut sebagai modal pembangunan, dan bagi SDM yang tidak memiliki kompetensi dapat ditrasformasi sedemikian rupa hingga dapat berkontribusi dalam pembangunan, sehingga bonus demografi tersebut bisa menjadikan generasi emas bagi pembangunan di Indonesia.

Adapaun reorientasi tersebut diupayakan dengan melakukan perubahan peran Pendidikan di Indonesia yang meliputi:

a. Peningkatan Anggaran

Otonomi daerah dan koordinasi antar kementerian membuat imlementasi semakin sulit, 40-50% anggaran pendidikan menghilang sebelum sampai ke peserta didik. Kebijakan mengharuskan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan berdasarkan jumlah peserta didik dan capaian target kinerja, dengan adanya peningkatan anggaran diharapkan permasalahan terkait kompetensi dan kesejahteraan bisa teratasi karena kesejahteraan dan kompentensi berjalan beringin menjadi dua sisi yang saling melengkapi.

Grafik 11.
Kebutuhan Peningkatan Anggaran Pendidikan Di Indonesia



(Kemendikbud: 2021)

Pembiayaan pendidikan menempati porsi yang signifikan dari APBN, namun secara keseluruhan pembiayaan untuk pendidikan lebih rendah daripada rata-rata negara OECD. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan nasional telah meningkat menjadi Rp. 493 T (~25% meningkat dari 2015). Selisih ~ Rp. 250 T (1,1% PDB) dibandingkan dengan rata-rata negara OECD, pada saat ini rata-rata APBN pendidikan terserap sejumlah 19,3% (0,7% dari 20%) periode kedepan anggaran pendidikan di Indonesia diharapkan bisa mencapai 25% dari APBN, dengan besaran rata-rata kekurangan 3,4%, hal ini diupayakan dengan melibatkan sektor swasta dan BUMN sebagai alternatif tambahannya.

b. Revisi dan Penataan Undang-Undang

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan lingkungan internal dan eksternal serta adanya inkonsistensi materi. Selain itu, juga adanya tumpang tindih regulasi di bidang pendidikan seperti terkait Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Karena itu perlu

dilakukan revisi serta penataan Undang-Undang yang dapat ditempuh dengan Konsep Omnibus Law.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan materi pada Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan penataan Undang-Undang di bidang pendidikan melalui pendekatan Omnibus Law. Tujuan dari Focus Group Discussion ini adalah untuk mengetahui permasalahan utama yang menjadi ketidakharmonisan dan sinkronisasi dalam Undang-Undang di bidang pendidikan. Kemudian, mengetahui Undang-Undang di bidang pendidikan yang tidak sinkron dan tidak harmonis satu sama lain, baik dalam materi muatan maupun implementasi Undang-undang tersebut. Mengetahui perlunya metode atau pendekatan *Omnibus law* dalam melakukan penataan Undang-Undang di bidang Pendidikan. Serta terakhir untuk mengetahui relevansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan penyusunan regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

c. Penyesuaian Kurikulum

Kurikulum yang berlaku saat ini memiliki materi yang terlalu banyak, tidak menyediakan ruang untuk memahami materi, dan melakukan refleksi pembelajaran, kurikulum juga tidak cukup praktis untuk diterjemahkan oleh guru kedalam materi pembelajaran dan aktivitas didalam kelas. Reorientasi yang dilakukan pada periode ini adalah melakukan perkembangan kurikulum secara *flexible*, yang didasari kompetensi, yang lebih berfokus pada *soft skill* dan pengembangan karakter.

Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat dan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan peserta didik terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan peserta didik sehari-hari.

Dengan demikian, diperoleh evaluasi secara menyeluruh baik itu kognitif, keterampilan sosial, dan perkembangan afektif. Dalam mengevaluasi, instrumen (alat ukur) yang bisa digunakan untuk mengukur

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dapat berupa tes hasil belajar. Dunia pendidikan harus mampu memadukan *link and match* antara kurikulum daya serap sektor tenaga kerja.

d. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

Kualitas pendidik sangat berpengaruh terhadap pemahaman diperoleh oleh peserta didik dimana pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari seorang pendidik kepada peserta didik, tetapi dilakukan dengan melalui interaksi belajar. Dalam kegiatan pembelajaran tenaga pendidik beserta peserta didik melakukan eksplorasi, mencari informasi yang luas dan dalam tentang tema yang dipelajari dari aneka sumber. Oleh karena itu, digunakan beragam pendekatan dan media pembelajaran yang atraktif serta efektif. Tenaga pendidik hendaknya dapat melakukan pengabungan antara materi diskusi, simulasi, dan presentasi secara bergantian untuk membantu memfokuskan konsentrasi peserta didik pada materi yang disampaikan. Untuk itu kecapan dan kualitas Tenaga pendidik merupakan pokok utama sebagai moderator pembelajaran.

Peningkatan kualitas tenaga Pendidik dilakukan melalui:

- 1) Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru generasi baru dengan memberlakukan *test* yang terdiri dari Ujian Penguasaan Konten, Ujian Bernalar Kritis, dan Ujian Kepribadian Wawancara pada calon guru baru.
- 2) Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mendapatkan penghasilan yang layak.
- 3) Pemberian penghargaan lebih kepada tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan performa yang berkualitas.
- 4) Kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada semua jenjang pendidikan selama ini menggunakan pendekatan *One Size Fit*, artinya semua sekolah dibangun dengan platform yang sama, Dalam menghadapi era globalisasi diharapkan sekolah menjadi lingkungan belajar yang inklusif dengan pemanfaatan teknologi, sehingga penerapan metode belajar yang

menitikberatkan pada praktik pengalaman menggunakan *tool* harus menjadi fokus pembelajaran.

1) Ruang Kelas

Dari seluruh sekolah di Indonesia, 90.749 ruang kelas mengalami rusak berat dan 60.760 ruang kelas rusak total. Secara Umum ruang kelas baik di sekolah swasta lebih baik, kecuali pada jenjang sekolah kejuruan.

Tabel 8.

Perbandingan Jumlah Ruang Kelas Dengan Kondisi Baik Pada Semua Jenjang Pendidikan di Indonesia Antara Sekolah Negeri dan Swasta

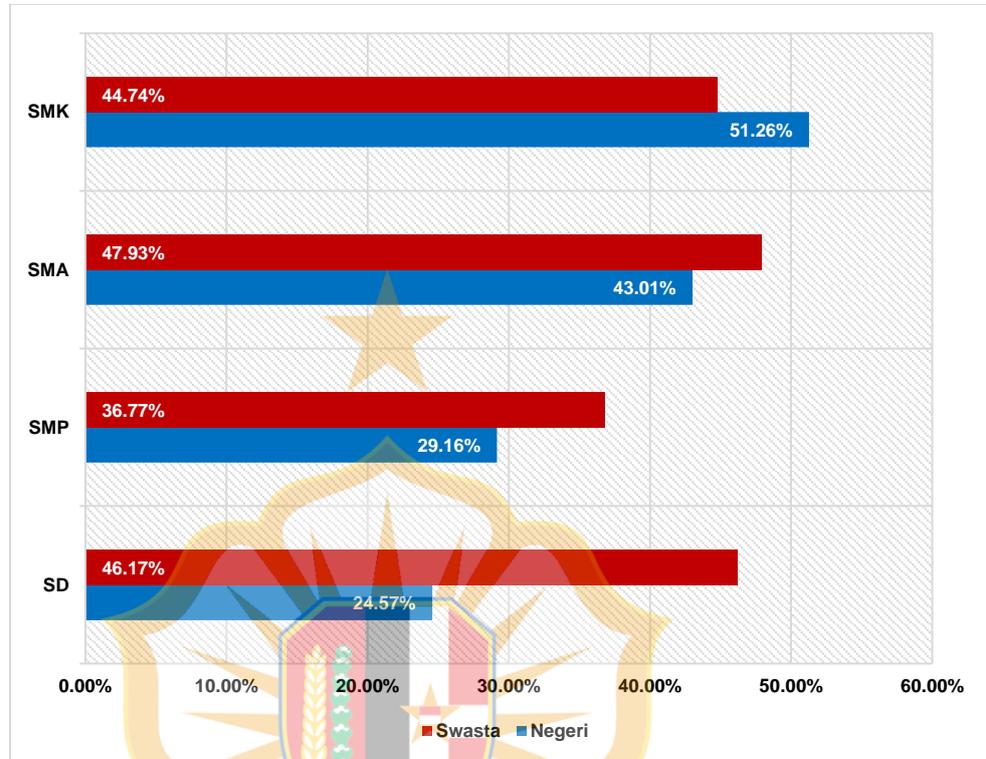
No	Jenjang Pendidikan	Status Sekolah	
		Negeri	Swasta
1	SD	24,57 %	46,17 %
2	SMP	29,16 %	36,77 %
3	SMA	43,01 %	47,93 %
4	SMK	51,26 %	44,74 %

(Kemendikbud: 2021)

Kondisi ruang kelas untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar sangat memprihatinkan. Untuk sekolah negeri, kurang dari 25% yang dalam kondisi baik, sisanya dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Sementara, untuk sektor swasta, kondisi kelas dengan Persentase terburuk ada pada tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mencapai 36,7%.

Jika diasumsikan kondisi ruang kelas baik hendak mencapai sejumlah 50% dari jumlah sekolah yang ada maka penjelasan tabel 8 di atas dapat dijadikan referensi bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi ruang kelas dengan kondisi baik.

Grafik 12.
Perbandingan Jumlah Ruang Kelas Dengan Kondisi Baik
Pada Semua Jenjang Pendidikan di Indonesia
Antara Sekolah Negeri dan Swasta



Melalui survei lingkungan yang dilakukan pada asesmen nasional nanti pada akhirnya dapat diketahui sekolah mana yang benar-benar membutuhkan anggaran bagi penambahan jumlah ruang kelas dan perbaikannya. Terlihat bahwa sekolah negeri pada jenjang pendidikan menengah dan atas memiliki jumlah kelas rusak di atas 25%.

2) Perpustakaan

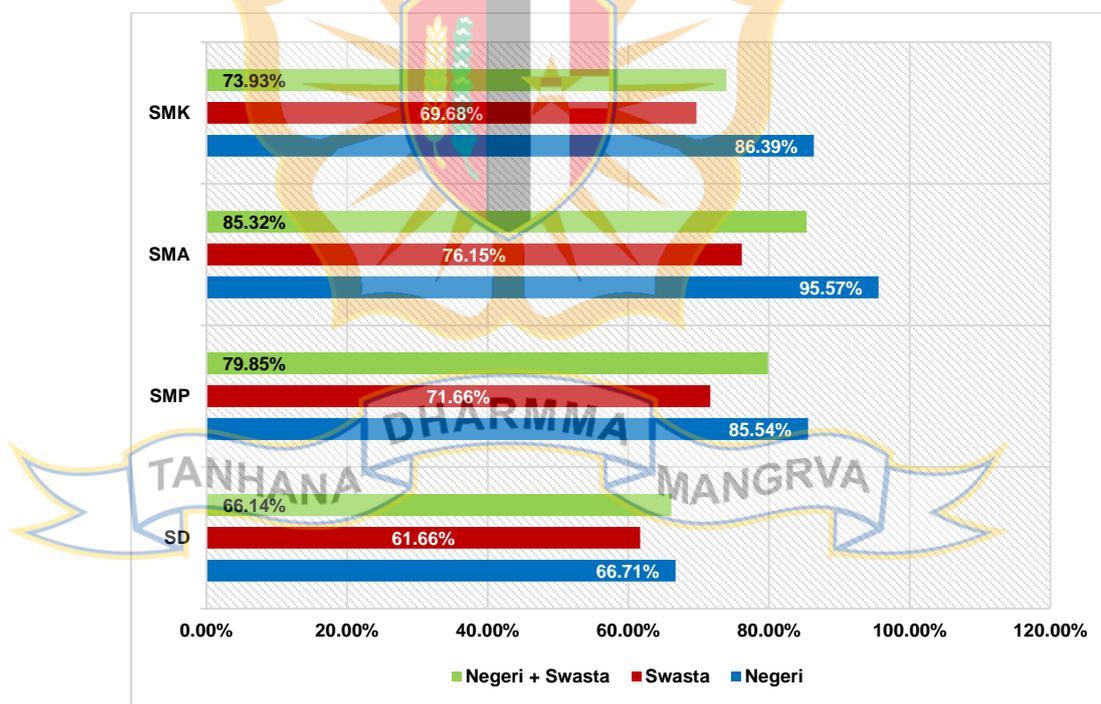
Kecukupan ketersediaan perpustakaan dapat juga dilihat dari Persentase perpustakaan terhadap sekolah. Secara umum, ketersediaan perpustakaan belum mencapai 100%, artinya belum semua sekolah dilengkapi dengan perpustakaan. Peranan dari *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari sektor swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN mungkin bisa di proyeksikan pada permasalahan penyediaan fasilitas perpustakaan di sekolah.

Tabel 9.
Jumlah dan Persentase Perpustakaan
Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah
TA 2018/2019

Jenjang Pendidikan	Negeri		Swasta		Negeri + Swasta	
	Jumlah	% Tase	Jumlah	% Tase	Jumlah	% Tase
SD	87.968	66,71	10.367	61,66	98.335	66,14
SMP	20.004	85,54	11.645	71,66	31.649	79,85
SMA	6.445	94,57	5.237	76,15	11.682	85,32
SMK	3.091	86,39	7.307	69,68	10.398	73,93

(Kemendikbud: 2021)

Grafik 13.
Jumlah dan %tase Perpustakaan
Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah
TA 2018/2019



f. Milestone Reorientasi Pendidikan

Langkah kongkrit atas jadwal target yang hendak dicapai dalam reorientasi peran pendidikan dalam mewujudkan generasi emas ini dalam kajian taskap yang di uraikan penulis ini dirumuskan dari beberapa kajian yang telah dilakukan dibagi ke dalam tiga tahapan, dimana periode tahun

2021 ke 2045 masih berkisar 24 (dua puluh empat) tahun dimana masing-masing tahapan akan ditempuh dalam 8 (delapan) tahun.



Gambar 5.
Milestone Reorientasi Pendidikan Mewujudkan Generasi Emas

Poin-poin pada setiap bagian target capaian dari reorientasi pendidikan mewujudkan generasi emas ini haruslah dijelaskan dalam pembagian periode pekerjaan sebagai berikut:

a. Tahap Pertama (2021-2029)

Reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas pada tahap pertama ini fokus perhatian ditujukan kepada penyesuaian kurikulum peningkatan anggaran dan peningkatan aksestabilitas, sehingga target upaya dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan yang masih rendah. Fokus utama tahap ini adalah pembangunan infrastruktur dan dukungan anggaran, sehingga diharapkan dapat meningkat APK dari 95% yang dapat diserap disemua jenjang pendidikan dasar, menengah, atas dan kejuruan, serta lebih dari 70% bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lebih meningkat.

b. Tahap Kedua (2029-2037)

Reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas pada tahap kedua ini difokuskan pada penguatan pendidikan karakter, meningkatkan

taraf pendidikan, modernisasi penyelenggaraan pendidikan, pendidikan karakter menjadi fokus utama, yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik atau siswa dalam setiap satuan pendidikan, selama ini berdasarkan konten dan kurikulum, ke depan pola ini harus segera diubah bahwa pedagogik haruslah berbasis kompetensi dan nilai, dan kurikulum sebagai regulator.

c. Tahap Ketiga (2037-2045)

Reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas, pada tahap ketiga ini difokuskan pada peningkatan satuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, yang bertujuan pembentukan difrensiasi misi pendidikannya masing-masing sekolah sebagai pusat-pusat unggulan dengan melakukan kerja sama dengan industri dan kemitraan global.



BAB IV PENUTUP

21. Simpulan

Reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas adalah pengartikulasian kembali wawasan dalam menentukan sikap pandangan kepada proses pendidikan yang diupaya oleh pemerintah dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik generasi penerus dengan menggunakan suatu perangkat pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia (*human capital*) yang dididik, diasuh dan diajar melalui sebuah transformasi pembelajaran, pengetahuan serta kemampuan melalui tahapan proses pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam menyokong pembangunan bangsa dimasa yang akan datang.

Simpulan dari kajian taskap reorientasi peran pendidikan nasional mewujudkan generasi emas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Reorientasi Peran Pendidikan Nasional Indonesia

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat memaksimalkan orientasi peran pendidikan itu sendiri, sejatinya orientasi peran pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi orientasi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan global.

Berdasarkan kajian dengan menggunakan Analisis SWOT, Implementasi nilai analisis SWOT pada IFAS dan EFAS berada pada kuadran II, Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah **Strategi Diversifikasi**. Penerapan strategi agresive dalam mereorientasi peran pendidikan berdasarkan analisis SWOT meliputi: Revisi Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penataan Undang-Undang Bidang Pendidikan Melalui Pendekatan Omnibus Law, Penyederhanaan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan, Penerapan Sistem Pendidikan Terpadu, Peningkatan Anggaran Pendidikan, Peningkatan Kompetensi Guru, Pemerataan Tenaga Pendidik, Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan

Aksestabilitas, Pemanfaatan Teknologi, Kerja Sama Pemerintah Daerah, Kerja Sama Luar Negeri, serta Kerja Sama Dengan BUMN dan Swasta.

b. Keselarasan Reorientasi Pendidikan Nasional Indonesia dengan Skenario 2045

Keselarasn reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas dikaitkan dengan 4 (empat) skenario 2045 yang dikaji oleh Lemhannas RI, kesemuanya mengacu kepada **Gambaran Rasa Nasionalisme** di masa depan. Hal ini menjadikannya sinyal kuat yang harus diantisipasi, untuk itu dalam milestone reorientasi peran pendidikan direncanakan pada tahap ke 2 (dua) di tahun 2029-2037. **Pendidikan Penguatan Karakter** melalui revolusi mental menjadi fokus penguatannya, hal ini sejalan dengan visi pendidikan Indonesia tahun 2045 yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai agama, Pancasila dan kearifan budaya Indonesia.

c. Meningkatkan Peran Stakeholder

Optimalisasi pendidikan mewujudkan generasi emas, didasarkan pada kuadran identifikasi stakeholder, Mendikbud merupakan pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Mendikbud mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas, dan berfokus pada, kurikulum dan Peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan pemangku kebijakan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas, tetapi memiliki sedikit kepentingan. Fokus penekanannya pada leading sektor yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawabnya dari masing-masing pemangku kebijakan pendukung reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas:

- 1) Kementerian Keuangan berfokus pada peningkatan anggaran pendidikan sebagaimana di amantakan dalam Undang-undang sebesar 20% dan Kesejahteraan Pendidik.

- 2) Kementerian Dalam Negeri berfokus pada penyediaan tanah negara bagi pembangunan infrastruktur pendidikan.
- 3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berfokus pada proses pengerjaan infrastruktur sarana pendidikan.
- 4) Kementerian Komunikasi dan informatika berfokus pada menyediakan jaringan data dan akses internet.
- 5) Gubernur, Walikota dan Bupati pengaruh mereka rendah hanya ditingkat wilayah tertentu saja. Untuk itu pemangku kebijakan di daerah berfokus pada koordinatif dengan pemangku kebijakan pada pemangku kebijakan pada kuadran *player* dan *contest setter*.
- 6) Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan masyarakat serta Swasta merupakan pemangku kepentingan yang sangat rendah tetapi memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dari reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas, untuk itu mereka harus memainkan peranan melakukan monitoring dan pengawasan.

22. Saran

Reorientasi peran pendidikan mewujudkan generasi emas, merupakan langkah perubahan arah paradigma baru pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan tersebut terdiri dari berbagai aspek mendasar yang saling berkaitan, untuk itu para pemangku kepentingan harus dapat melakukan dan memainkan perannya antara lain:

a. Kemendikbud

- 1) Merevisi Aturan Perundang-undang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah selayaknya melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2003, yang sudah berjalan selama 18 tahun. Sejumlah catatan yang menjadi landasan bagi revisi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menyelaraskannya dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tanggal 13 Agustus 2019.

- 2) Melakukan Perubahan Terhadap Kurikulum

Perubahan terhadap kurikulum 2013 dengan mengupayakan pendekatan pada, kebutuhan pendidikan di abad 21 dengan pendekatan **OECD Learning Compas**.

3) **Mentransformasi kepemimpinan Internal di Kemendikbud**
Transformasi kepemimpinan internal, baik di dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar terjadinya pola regenerasi, dapat dilakukan dengan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja agar organisasi dapat berkembang.

b. Kemenkeu

Dapat memperjuangkan kenaikan anggaran pendidikan dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya melalui hibah bantuan luar negeri terutama bagi daerah yang memiliki sumber pedanaan APBD yang rendah. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.

c. Kemendagri, Kemempupr dan Kemenkominfo

Dapat membangun sinergitas membuat suatu program yang melibatkan 3 instansi pemerintah dalam mendukung ketersediaan lahan, pembangunan infrastruktur dari jaringan data dan telekomunikasi yang di koordinasikan dengan pemerintah daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada daerah terluar, terpencil dan terisolir.

Pemerataan aksestabilitas pendidikan dapat dirasakan bukan hanya di wilayah pulau jawa saja, tetapi menjangkau seluruh pelosok tanah air. Tentu saja hal ini juga diharuskan melibatkan peran organisasi guru dan masyarakat yang didukung oleh swasta dan industry, sebagai bentuk pemberdayaan sosial agar dapat melakukan kontrol terhadap jalannya program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Suryadi, Deden E. Ariffan, 2019, Membangun Meritokrasi Pendidikan Indonesia, Menuju Layanan Pendidikan yang bermutu dan Berdaya Saing, Esensi Erlangga Group.
- Badan Pusat Statistik, Potret Pendidikan Indonesia, Statistik Pendidikan 2019
- Bambang Ismaya, Dikdik Supriyadi, 2020, Manajemen Kebijakan Pendidikan, Reflika Aditama.
- Bernanda Rurit, Nugroho Dewanto, Indonesia Menoedjoe 20-45 SDM Unggul Adalah Koentji, 2020, Lembaga Ketahanan Nasional
- Hafid Abbas, 2019, Meluruskan Arah Pendidikan, Isu-isu Pendidikan Solusi dan Prospek.PT. Kompas Media Nusantara.
- Haryatmoko, 2020, Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan Jawaban Atas Tantangan Dirupsi-Inovatif, Gramedia
- Irham Fahmi, Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan solusi,2010, Alvabeta, Bandung
- Kemendikbud, Bahan Ajar Lemhannas (2021:29)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Analisa Keamey, Bahan Ajar Lemhannas (2021:5-6)
- Peta Jalan Generasi Emas 2045 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017)
- Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M. Pd, Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu
- R. Arifin Nugroho, 2019, *Highr Order Thinking Skill (HOTS)*, Kompas Gramedia.
- Sudarsana, Ketut, "Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia".
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UUD 1945, Pasal 31 ayat (1), (2), (3) (4) dan (5)
- Asesmen Nasional (kemdikbud.go.id)
- <https://jejakparlemen.id/rangkuman/>
- <https://kbbi.web.id/orientasi>

<https://republika.co.id/berita/q9oz63380/strategi-belajar-kemendikbud-di-masa-pandemi-covid19>

<https://www.dw.com/id/unesco-peringatan-krisis-pendidikan-dunia/a-17394084>

Pusat Asesmen dan Pembelajaran (kemendikbud.go.id)

Skenario Indonesia 2045 - Medcom.id

Skenario Indonesia 2045 (1) Seabad RI Dalam Empat Skenario – TNI Angkatan Darat (tniad.mil.id)

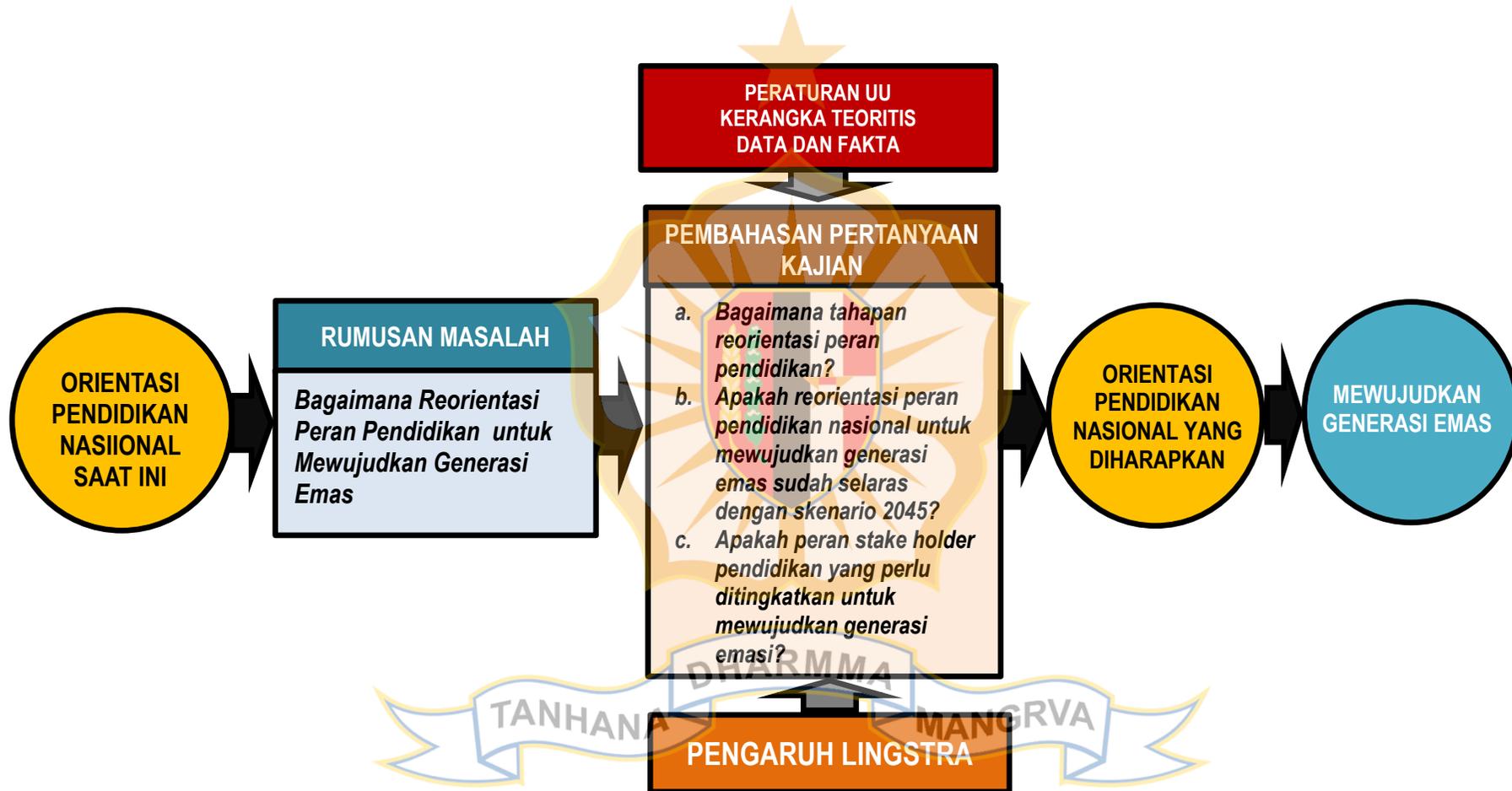
Strategi Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 Halaman 1 - Kompasiana.com

UNESCO *Futures of Education - LEARNING TO BECOME*

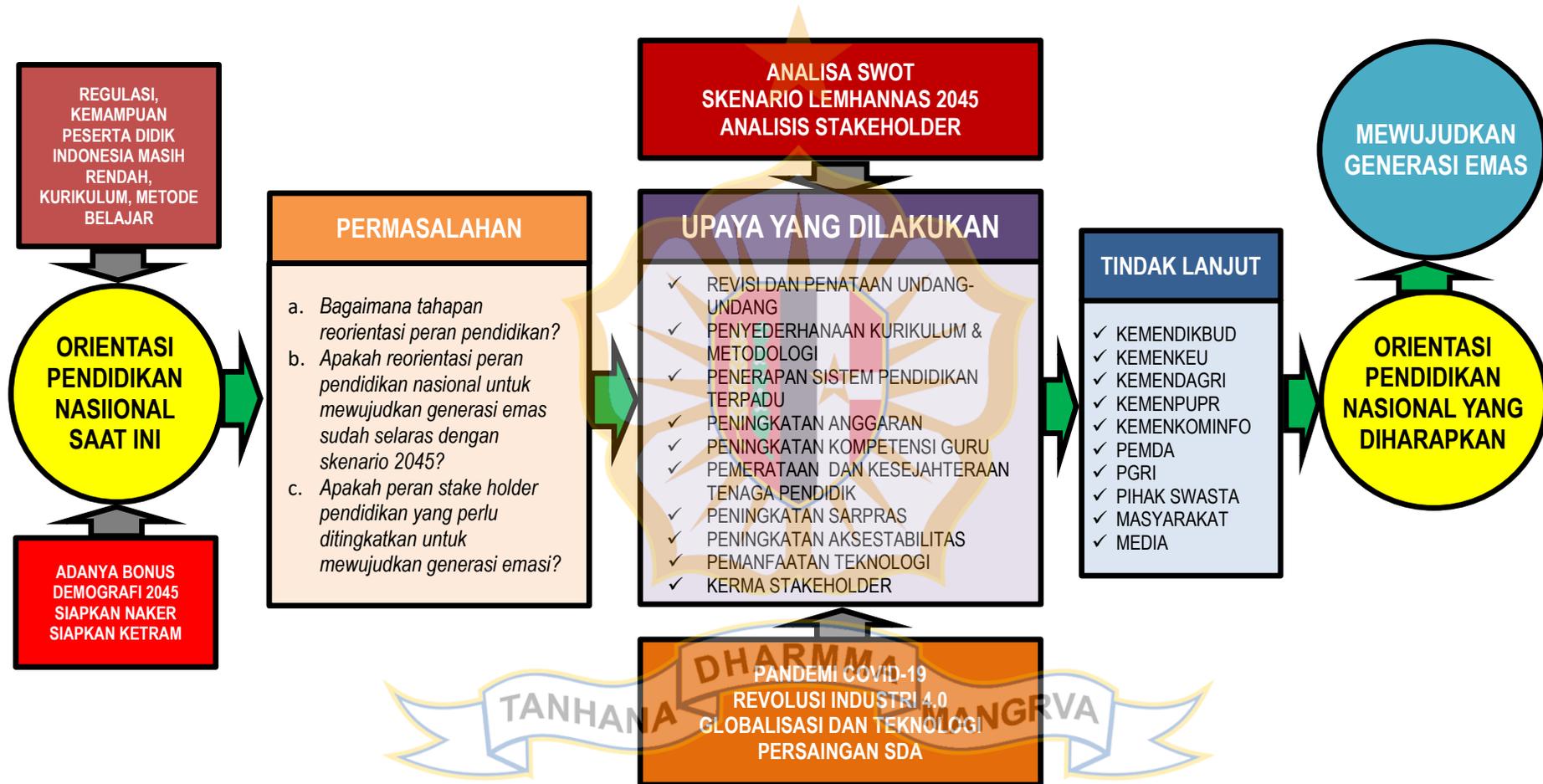
www.oecd.org



POLA PIKIR



ALUR PIKIR





BASTONI PURNAMA, SIK

PROFILE

Bastoni Purnama dilahirkan di Lampung 1 Desember 1973, anak ke-2 dari pasangan Bpk. Sulaiman Kabul dan Ibu Heliyana. Bastoni telah menikah dengan Mince Purnama dan mempunyai 3 orang putri yaitu Raissa Mauly Basmine, Alya Alania Basmine dan Rahma Qaina Basmine. Selama bertugas di Kepolisian, Bastoni banyak bertugas di bidang reserse, SDM, logistik dan 3 kali menjabat Kapolres. Penghargaan yang diterima oleh Bastoni antara lain; SL Kesetiaan 8 Tahun, SL Kesetiaan 16 Tahun, SL Kesetiaan 24 Tahun, SL Dharma Nusa, Penghargaan Kapolri Atas Pembuatan e-KTA Polri, Penghargaan MURI dalam pengungkapan kasus narkoba dan kasus anak di Jakarta Selatan.

CONTACT

PHONE:
+62-817 189696

EMAIL:
bastonipurnama@gmail.com

HOBBIES

Membaca buku
Olah raga
Otomotif
Travelling

MOTO HIDUP

Hidup adalah ibadah, dan sebaik-baiknya hidup adalah yang dapat memberi manfaat bagi sesama manusia.

ANALIS KEBIJAKAN MADYA BID. FASKON SLOG POLRI

PENDIDIKAN

AKADEMI KEPOLISIAN TAHUN 1996
PTIK (S1) TAHUN 2004
SESPIM POLRI TAHUN 2010
LEMHANNAS PPRA LXII TAHUN 2021

RIWAYAT JABATAN

KAROLOG POLDA LAMPUNG (IIB2)	03-02-2020
KAPOLRES METRO JAKSEL POLDA METRO JAYA (IIB2)	02-08-2019
KABAGINVENT ROFASKON SLOG POLRI (IIB3)	17-09-2018
KABAGBINKAR BIRO SDM POLDA METRO JAYA (IIIA1)	28-04-2016
KAPOLRES BANYUWANGI POLDA JATIM (IIIA2)	13-05-2015
KAPOLRES TULUNGAGUNG POLDA JATIM (IIIA2)	22-08-2014
KASUBBAGMUTJABPAMENTI BAGMUTJAB ROBINKAR SSDM POLRI (IIIA1)	05-06-2013
KASUBBAGMUTJABPAMA BAGMUTJAB ROBINKAR SSDM POLRI (IIIA2)	20-12-2011
KASATRESKRIM POLRES METRO JAKTIM POLDA METRO JAYA (IIIA2)	04-04-2011

RIWAYAT PANGKAT

KOMBES POL	01-01-2019
AKBP	01-01-2012
KOMPOL	01-01-2008
AKP	01-01-2003
IPTU	01-01-2000
IPDA	19-12-1996

PENUGASAN LUAR NEGERI

COMPARATIVE STUDY OF ENVIRONMENTAL LAW IN AUSTRALIA, 2001
CYBER CRIME COURSE IN POLITIE ACADEMY OF NETHERLAND, 2007
ILEA, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN BANGKOK, 2011